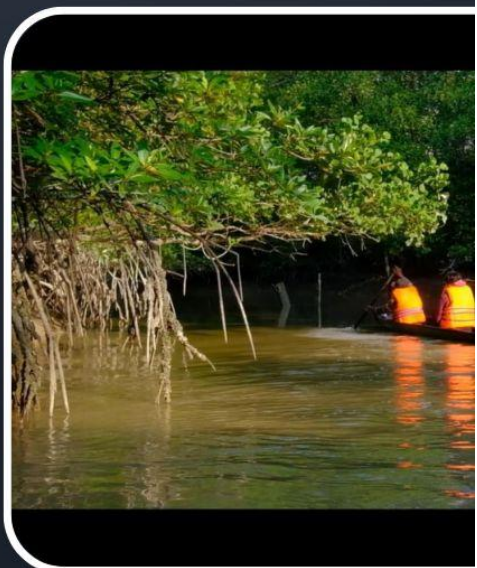
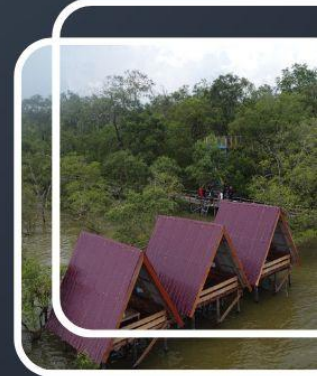


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025



BAGIAN ORGANISASI SETDA



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag
Bupati Tanjung Jabung Barat

BUPATI



Dr. H. KATAMSO, SA, S.E., M.E.
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

WAKIL BUPATI



HERMANSYAH, S.STP, M.H
SEKRETARIS DAERAH



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr, wb

Syukur alhamdulillah Patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayahNya Laporan Kinerja Tahun an Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Tahun an Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memuat Informasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 yang memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 (Lima) Tahun .

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun dengan membandingkan target dan capaian indikator kinerja daerah yang bersifat *outcomes*, yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Laporan ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja daerah dan berbagai inovasi daerah yang dilakukan pada Tahun 2025. Secara umum kinerja Tahun 2025 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.



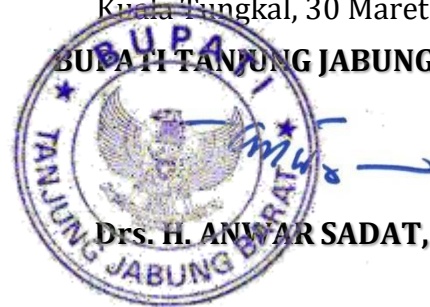
Selanjutnya laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam manajemen kinerja, keuangan dan pengawasan.

Akhirnya tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja daerah, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi kriteria penilaian sehingga maksud dan tujuan sesungguhnya tercapai dan bermanfaat bagi semua *stakeholders*. Kami mengharapkan adanya pemberian saran dan kritik untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kuala Tungkal, 30 Maret 2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
IKHTISAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	3
1.2.1. Undang-undang Pembentukan Daerah	3
1.2.2. Data Geografis Wilayah.....	3
1.2.3. Informasi Umum Data Kependudukan.....	6
1.2.4. Perekonomian dan Sosial Budaya.....	9
1.2.5. Keuangan Daerah (Anggaran)	9
1.3. KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	10
1.3.1. Kelembagaan	10
1.3.2. Aparatur Pemerintah Daerah	15
1.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	16
1.4.1. Permasalahan	16
1.4.2. Isu Strategis.....	25
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN.....	41
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN	43
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	45
2.1. RPJMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026.....	45
2.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	45
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	49
2.4. PERJANJIAN KINERJA.....	54
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	59
3.1. CAPAIAN KINERJA	59
3.2. ANALISA DAN EVALUASI KINERJA.....	63
3.3. REALISASI ANGGARAN.....	130
BAB IV PENUTUP	134
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	5
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	7
Tabel 3 <i>Jumlah Pns Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin</i>	15
Tabel 4 Rekap Rumah Terbangun (Mbr) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 – 2024	22
Tabel 5 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kab. Tanjung Jabung Barat.....	23
Tabel 6 Distribusi Dan Luas Lahan Penyediaan Air Bersih	24
Tabel 7 Isu Strategis Pembangunan Daerah Pada Tingkat Internasional	26
Tabel 8. Isu Strategis Pembangunan Daerah Pada Tingkat Nasional.....	27
Tabel 9. Distribusi Dan Luas Lahan Penyediaan Air Bersih.....	35
Tabel 10. Distribusi Dan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	36
Tabel 11. Penjabaran Misi, Tujuan Dan Sasaran.....	49
Tabel 12. Indikator Kinerja Utama.....	52
Tabel 13. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	56
Tabel 14. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	60
Tabel 15. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2025.....	61
Tabel 16. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Indeks Pembangunan Manusia.....	63
Tabel 17. Perbandingan Nilai Ipm Kab. Tanjung Jabung Barat Dengan Nilai Ipm Nasional.....	64
Tabel 18. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Pembangunan Manusia.....	76
Tabel 19. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indeks Ketentraman.....	77
Tabel 20 Data Pengaduan Dan Pelanggaran Perda Tahun 2022	79
Tabel 21 Data Pengaduan Dan Pelanggaran Perda Tahun 2023	79
Tabel 22. Jumlah Pengaduan Dan Pelanggaran Perda Tahun 2024.....	80
Tabel 23. Jumlah Pengaduan Dan Pelanggaran Perda Tahun 2025	80
Tabel 24. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Ketentraman	83
Tabel 25. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indeks Reformasi Birokrasi.....	85
Tabel 26. Perbandingan Indeks RB Kab. Tanjung Jabung Barat Dengan Indeks Rb Nasional.....	86
Tabel 27. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Dan 2025.....	88
Tabel 28. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.....	90
Tabel 29. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Nilai SAKIP Kabupaten	91
Tabel 30. Perbandingan Nilai Sakip Kab. Tanjung Jabung Barat Dengan Nilai SAKIP Nasional	91
Tabel 31. Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, 2024 Dan 2025	91
Tabel 32. Kategori Penilaian SAKIP	92
Tabel 33. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai SAKIP Kabupaten..	99
Tabel 34. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator	101
Tabel 35. Perbandingan Nilai Ikm Kab. Tanjung Jabung Barat Dengan IKM Provinsi Jambi.....	101
Tabel 36. Ikm Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025	104
Tabel 37. Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Unit Pelayanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Dan 2025.....	105
Tabel 38. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator.....	107
Tabel 39. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan.....	108
Tabel 40. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan.....	110



Tabel 41. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	111
Tabel 42. Perbandingan Laju Pertumbuhan Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi Dan Nasional.....	111
Tabel 43. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	116
Tabel 44. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	117
Tabel 45. Perbandingan Iklh Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi Dan Nasional Tahun 2025.....	117
Tabel 46. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	120
Tabel 47. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Indeks Gini Dan Indeks Infrastruktur.....	122
Tabel 48. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Gini Dan Indeks Infrastruktur.....	129
Tabel 49. Jumlah Dan Realisasi Belanja APBD (Perubahan) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025	131
Tabel 50. Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2025	132
Tabel 51. Realisasi Anggaran Dibandingkan Dengan Realisasi Kinerja	133



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	15
Grafik 2 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	17
Grafik 3. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	62
Grafik 4. Indek Pembangunan Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat	64
Grafik 5 Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah.....	69
Grafik 6. Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tanjungjabung Barat.....	88
Grafik 7. Nilai Sakip Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 s/d 2025	94
Grafik 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi	112
Grafik 9. (Tpt) Kab. Tanjung Jabung Barat	114
Grafik 10. Indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025	122



IKHTISAR

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selama penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2025, sebagai tolak ukur peningkatan kinerja kedepan pada Tahun -Tahun berikutnya sebagaimana program – program yang telah disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026, tentunya sebagai upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dilaksanakan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memuat sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai. Dimana dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional dan mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan, hambatan - hambatan / kendala yang ditemui dalam pelaksanaan serta mengungkapkan juga strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.

Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (*IKU*). Dalam dokumen ditetapkan 9 (*Sembilan*) sasaran strategis.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2025 masuk dalam kategori “BERHASIL”, karena rata-rata capaiannya 108.79% dari target. realisasi terhadap capaian 10 indikator sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dari target yaitu Indeks Pembangunan manusia 100,30%, Indeks Ketentraman 102,05%, Indeks Reformasi Birokrasi 105,65%, Nilai SAKIP Kabupaten 93,62%, Indeks Kepuasan Masyarakat 103,81%, Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 100%, Laju Pertumbuhan Ekonomi 108,06%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 89,54%, Indeks gini 96,63% dan Indeks Infrastruktur 94,63%



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah kepada masyarakat. Penyusunan LKJIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dilaksanakan sebagai wujud implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam era reformasi birokrasi, tuntutan terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi. Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan yang cepat dan berkualitas, tetapi juga mengharapkan adanya keterbukaan informasi terkait capaian kinerja pemerintah. Oleh karena itu, LKJIP menjadi instrumen penting dalam menyampaikan informasi kinerja secara sistematis dan terukur.

Penyusunan LKJIP Tahun 2025 juga merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki orientasi pada hasil (outcome) yang jelas.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya dan menjalankan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengukuran kinerja yang akurat untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama Tahun anggaran 2025.

LKJIP disusun berdasarkan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini menjadi acuan dalam menetapkan indikator kinerja utama yang akan dievaluasi dalam laporan kinerja.



Selama Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, LKJIP disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap capaian tersebut.

Selain sebagai alat evaluasi internal, LKJIP juga berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan. Melalui laporan ini, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

Penyusunan LKJIP juga mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setiap perangkat daerah dituntut untuk memiliki indikator kinerja yang jelas serta mampu mempertanggungjawabkan pencapaiannya.

Dalam proses penyusunannya, LKJIP Tahun 2025 melibatkan berbagai perangkat daerah yang menyampaikan data dan informasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan akurat.

Evaluasi terhadap capaian kinerja yang dituangkan dalam LKJIP menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di Tahun berikutnya. Dengan demikian, LKJIP tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan strategis.

Lebih lanjut, penyusunan LKJIP juga mendukung peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nilai SAKIP yang baik mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan baik.

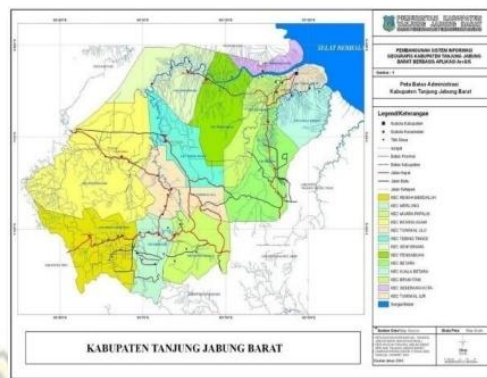
Dengan demikian, penyusunan LKJIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan akuntabel mengenai kinerja pemerintah daerah. Laporan ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat



1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1.2.1. Undang-undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semula bernama Kabupaten Dati II Tanjung Jabung, dengan Ibu kotanya Kuala Tungkal yang diresmikan pada Tanggal 10 Agustus 1965 yang dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965), kemudian dimekarkan pada Tanggal 4 Oktober 1999 menjadi dua wilayah yaitu :



- Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten Induk dengan Ibukota Kuala Tungkal.
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Kabupaten Hasil Pemekaran dengan Ibukota Muaro Sabak.

1.2.2. Data geografis wilayah

Batas-batas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tebo
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Selat Berhala

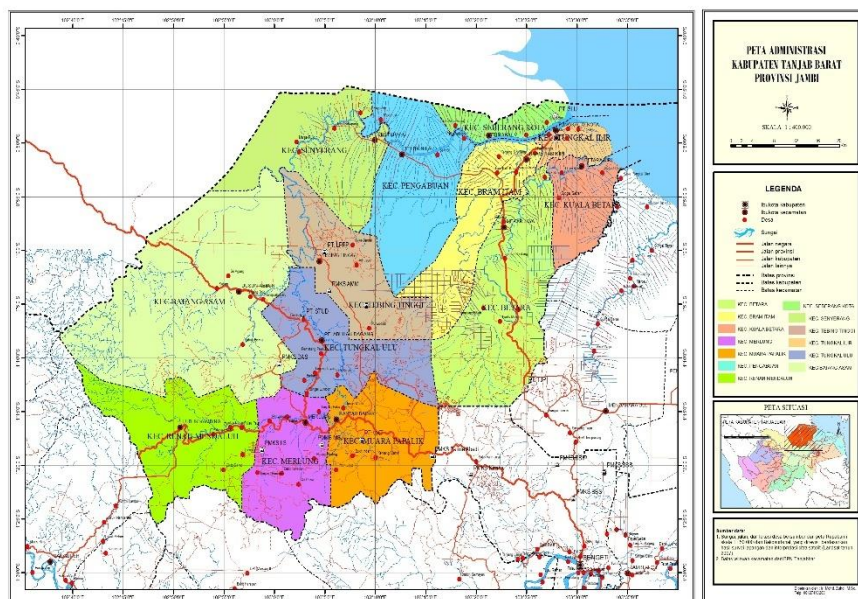
Pusat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung barat berada di Kota Kuala Tungkal yang berjarak ± 125 Km dari Ibukota Provinsi Jambi). Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup strategis sebagai kawasan Pantai Timur (KPT) Provinsi Jambi yang langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*)

Sampai dengan Tahun 2025, secara Administrasi Kewilayahan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 Kecamatan 20 Kelurahan dan 114 Desa.



Wilayah Kecamatan terdiri dari : Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, dan Kecamatan Batang Asam. Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat keseluruhan adalah 5009.82 Km², dimana kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Batang Asam yaitu, 1.042,37 Km² dan wilayah tersempit adalah Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan Ibukota Kabupaten dengan luas 100,31 Km².

Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi



Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dari permukaan laut di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Provinsi Riau, untuk dataran rendah yang berkisar pada ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut, maka struktur tanahnya sebagian besar



merupakan tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang/surutnya air laut.

**Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dibedakan Menurut Klasifikasi Ketinggian Tahun 2025**

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
Dataran Rendah (0 - 25)	213.424,4	42,8	Kecamatan Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ilir, Bram Itam, Seberang Kota, Betara dan Kuala Betara.
Dataran sedang (25 - 500)	273.090,9	54,8	Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Sebagian Batang Asam, Tebing Tinggi, Sebagian Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik.
Dataran Tinggi (>500)	11.910	2,4	Sebagian Batang Asam, Sebagian Renah Mendaluh
Jumlah	500.982	100	

Sumber : RTRW Tanjung Jabung Barat

Kondisi air Permukaan dan air tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi pasang surut. Pada saat musim penghujan fluktuasi air tanah dan permukaan akan tinggi sehingga menyebabkan di beberapa tempat terjadi genangan atau banjir, sedangkan pada saat kemarau dimana air sungai rendah dan terjadi penyusutan air laut jatuh ke wilayah pedalaman.

Dibagian muara sungai dan pesisir keadaan tata airnya sangat tergantung pada pengaruh pasang surut yang terjadi di Selat Berhala. Frekwensi pasang surut terjadi pada setiap 12 jam, dengan ketinggian permukaan antara 2-3 meter, bahkan pada saat pasang besar (*spride tide*) dapat lebih tinggi. Batas jangkauan pasang surut yang langsung maupun yang tidak sehingga intrupsi air laut dapat berpindah-pindah sesuai dengan keadaan sugai dan pergantian musim. Berdasarkan pengaruh pasang surut pada dataran rendah dapat diidentifikasi sebagai daerah yang sedikit atau sama sekali tanpa pengaruh pasang surut yakni jalur alirang sungai perential dan tawar, dataran banjir musiman dan daerah belakang.



Berdasarkan ketersediaan sumber daya air dibagi dalam 3 (tiga) wilayah sebagai berikut : (1) Wilayah Basah, di wilayah ini dikembangkan padi, sayur-sayuran, palawija, tambak/kolam keramba dan pengembangan peternakan unggas; (2) wilayah basah/ Kering, di wilayah ini dikembangkan padi, palawija termasuk sayur-sayuran dan ternak seperti kambing dan ayam; dan (3) wilayah kering, di wilayah ini dikembangkan ternak besar dan perkebunan.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26,9° C, suhu minimum adalah 21,9° C dan maksimum 32° C. Curah hujan rata-rata berkisar 2238,5 mm/Tahun atau rata-rata berkisar antara 186,54 mm/bulan dengan hari hujan berkisar 5-11 hari/ perbulan. Artinya Distribusi hujan bulan cukup merata. Puncak bulan basah terjadi pada Bulan November – Januari dan bulan kering pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus sebagaimana daerah lain yang ada di provinsi Jambi.

Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat strategis baik dari sisi perhubungan darat maupun perhubungan laut. Dari sisi perhubungan darat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kelebihan tersendiri dikarenakan wilayahnya berada di Jalur Lintas Timur (Jalintim) Sumatera. Jalintim merupakan urat nadi perekonomian di Pulau Sumatera. Dari sisi perhubungan laut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat diuntungkan karena letak geografisnya langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*).

1.2.3. Informasi Umum Data Kependudukan.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah 5.009,82 km² di diami penduduk sebanyak 336.978 jiwa. Penduduk ini tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan yaitu Tungkal Ulu, Tungkal Ilir, Pengabuan, Betara, Merlung, Tebing Tinggi, Batang Asam, Renah Mendaluh, Muara Papalik, Seberang Kota, Bram Itam, Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang. Dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2025 sebanyak 64 orang per kilometer persegi (KM²), sebagaimana tabel dibawah ini :



**Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Per Kecamatan Tahun 2025**

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4	5
1	Tungkal Ilir	100,31	76,530	762.93
2	Tungkal Ulu	345,69	15,669	45.33
3	Batang Asam	1.042,37	38,024	36.48
4	Betara	570,21	33,423	58.62
5	Bram Itam	312,66	19,944	63.79
6	Kuala Betara	185,89	14,414	77.54
7	Merlung	311,65	17,152	55.04
8	Muara Papalik	336,38	11,050	32.85
9	Pengabuan	440,13	26,895	61.11
10	Renah Mendaluh	473,72	18,010	38.02
11	Seberang Kota	121,29	9,298	76.67
12	Senyerang	426,63	26,116	61.21
13	Tebing Tinggi	342,89	37,508	109.39
TANJUNG JABUNG BARAT		5009,82	344,033	68.67

Sumber Data : *Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat semester II 2025*

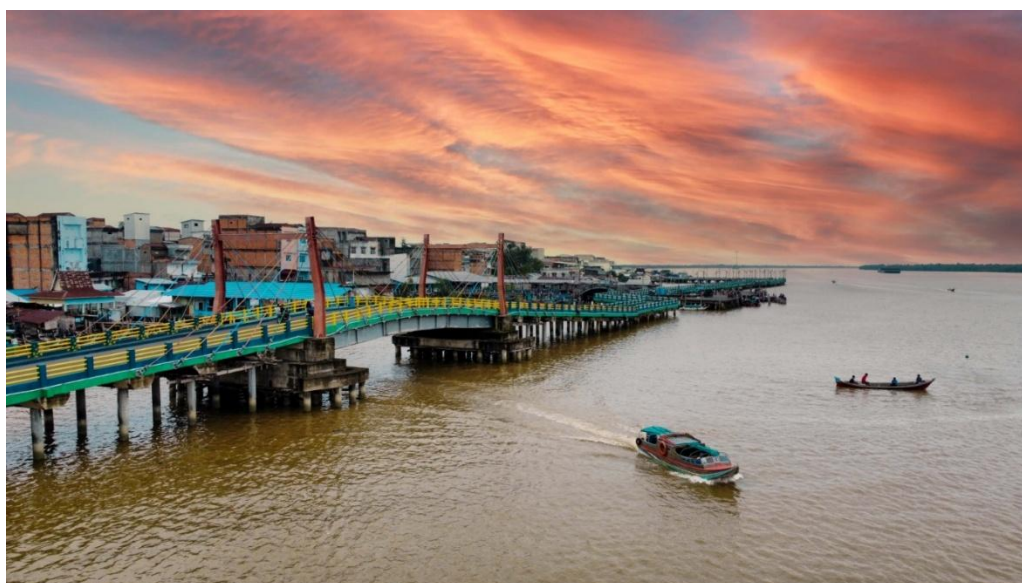
Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan Ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk pada Semester dua Tahun 2025, sebanyak 76,530 orang. Konsentrasi kepadatan penduduk di Kecamatan Tungkal Ilir merupakan Ibu Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dengan segala fasilitasnya mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk di daerah sekitarnya untuk bermigrasi ke Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Kepadatan Penduduk pada hakekatnya merupakan komponen penduduk berdasarkan geografis, dimana data kepadatan penduduk dapat dilihat apakah komposisi tersebut merata atau tidak, oleh karena itu kepadatan dapat dilihat menurut wilayah administrative yang lebih kecil. Melalui kepadatan penduduk dapat dilihat dimana saja terjadi pemusatan penduduk.

Kepadatan penduduk paling tidak dipengaruhi tiga faktor yaitu letak geografis, kesuburan tanah merupakan faktor geografis, keadaan sosial, ekonomi dan faktor demografi. Keadaan iklim dan kesuburan tanah merupakan faktor geografis utama yang berpengaruh terhadap persebaran penduduk di suatu wilayah. Sedangkan faktor sosial dan ekonomi yang cukup berpengaruh terhadap persebaran penduduk antara lain budaya dan tujuan hidup penduduk serta ketersediaan fasilitas untuk kegiatan sosial ekonomi. Untuk faktor demografi yang cukup berpengaruh, diantaranya kelahiran, kematian dan migran

Kabupaten Tanjung Jabung Barat tergolong Kabupaten yang berpenduduk jarang kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten/ Kota di pulau Jawa, dimana jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 jumlah penduduk sebanyak 344.033 jiwa dengan kepadatan 65 jiwa/km²





1.2.4. Perekonomian dan Sosial Budaya

Perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada bidang – bidang tertentu seperti perekonomian, dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik dalam mendukung pengembangan wilayah, termasuk sarana dan prasarana, antara lain terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang relatif masih rendah sehingga berdampak pada produktivitas kerja serta masih tingginya kesenjangan ekonomi yang diindikasikan dari angka pengangguran dan tingkat penduduk miskin masih relatif tinggi, angka gini rasio dalam kategori sedang serta iklim investasi yang masih perlu dioptimalkan. Pada bidang Sosial Budaya yang berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat beragam karena penduduk yang berdomisili dari bermacam suku seperti suku Jawa, Melayu, Bugis, Banjar, Padang, Batak, dan penduduk asli Jambi. Sebagian besar berbudaya melayu dan banjar yang berjalan secara Islami, karena di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mayoritas penduduknya beragama Islam.



1.2.5. Keuangan Daerah (*Anggaran*)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan Tahun 2025 memperoleh dan menggunakan Anggarannya secara Profesional, efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan program – program sebagai berikut :



	PENDAPATAN DAERAH	JUMLAH (Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	146.590.263.595,00
2	Pendapatan Transfer	1.932.415.899.162,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	6.690.520.129,33
JUMLAH TOTAL		2.085.696.682.886,33

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah

1.3. KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH

1.3.1. Kelembagaan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah telah dibentuk pula Susunan Organisasi Perangkat Daerah (*SOPD*) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Nomenklatur Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe B mempunyai tugas



menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;

- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura;
 - 6) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
 - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;



- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- 10) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintah bidang kebudayaan dan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga.
- 11) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 12) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 15) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 16) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 17) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan



pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

- 18) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - 19) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 20) Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 21) Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - 22) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- e. Badan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten; dan
 - 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;



- 6) Badan Penanggulangan Bencana Tipe C.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
- 1) Tungal Ilir dengan Tipe A;
 - 2) Tungal Ulu dengan Tipe A;
 - 3) Batang Asam dengan Tipe A;
 - 4) Betara dengan Tipe A;
 - 5) Bram Itam dengan Tipe A;
 - 6) Kuala Betara dengan Tipe A;
 - 7) Merlung dengan Tipe A;
 - 8) Muara Papalik dengan Tipe A;
 - 9) Pengabuan dengan Tipe A;
 - 10) Renah Mendaluh dengan Tipe A;
 - 11) Seberang Kota dengan Tipe A;
 - 12) Senyerang dengan Tipe A;
 - 13) Tebing Tinggi dengan Tipe A.



1.3.2. Aparatur Pemerintah Daerah

Jumlah aparatur Sipil Negara di Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 berjumlah 5.558 orang dengan Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.282 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.276.

**Tabel 3 Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025**

	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	
1	Sampai dengan SD	2		0		2
2	SMP/Sederajat	7		1		8
3	SMA/Sederajat	236	104	85	54	479
4	Diploma I, II/Akta I, II	38		24		62
5	Diploma III, IV/Akta III, IV	126	79	337	381	923
6	Tingkat Sarjana/Pasca Sarjana/Doktor	1014	495	1.412	1164	4085
Jumlah		1.423	678	1859	1599	5.558

Sumber: Data BKPSDM Tahun 2025



Grafik 1. Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat



1.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1.4.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dijadikan masalah pembangunan daerah adalah : (1) cakupan masalah yang luas, (2) permasalahan yang apabila tidak segera diatasi akan membesar dan berdampak negatif pada pemerintah daerah dan (3) memerlukan penanganan yang konsisten dan melibatkan banyak pihak.

Permasalahan pembangunan Daerah dirumuskan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah yang menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan Daerah yang pokok dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

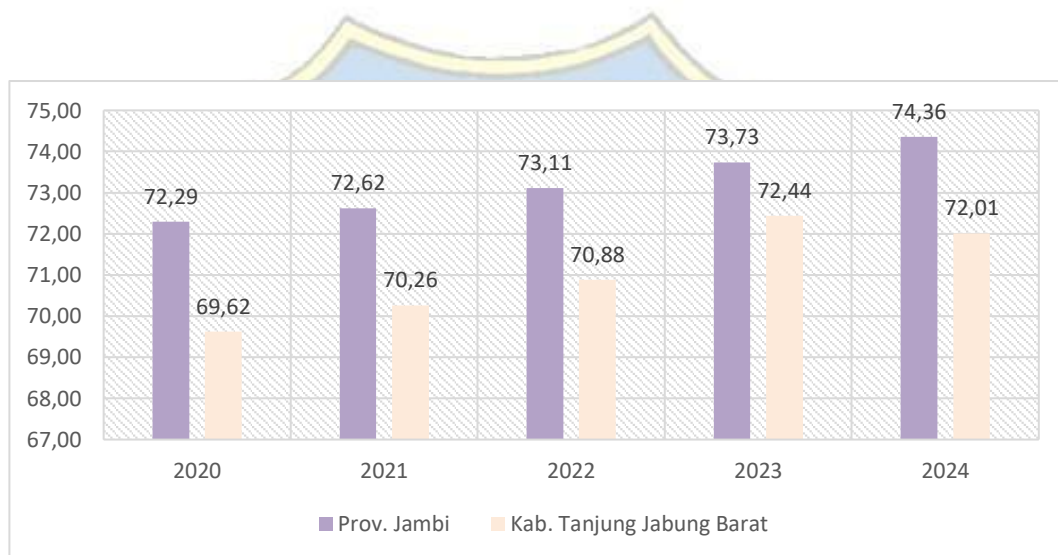
a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Merata

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih rendah, kualitas sumberdaya manusia dapat ditunjukkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 72,01. Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 10 dari 11



kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi, serta masih dibawah rata-rata IPM Provinsi Jambi dan Nasional. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat cenderung mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun , hanya saja Tahun 2020 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Secara tren IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan.

**Grafik 2 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2020-2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2025

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2020 hingga 2024 cenderung meningkat sebesar 0,24 % per Tahun . Usia harapan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih berada jauh dari Provinsi Jambi dengan nilai tertinggi mencapai 74,06 pada Tahun 2024. Kemudian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024 masih tergolong rendah yaitu hanya selama 8,32 Tahun . Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 2 pada jenjang sekolah menengah pertama. Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, rata-rata lama sekolah



Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 9 dari 11 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi, serta masih dibawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi. Untuk pengeluaran riil perkapita perTahun yang disesuaikan dari Tahun 2024 sebesar Rp.10.696.000,-. Kondisi ini berada di urutan ke 9 dari 11 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi, serta masih dibawah rata-rata pengeluaran riil perkapita perTahun yang disesuaikan Provinsi Jambi

b. Alih fungsi lahan pertanian dan gambut menjadi pemukiman/perkebunan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disadari bahwa mewujudkan swasembada pangan tersebut tidaklah mudah karena kompleksnya interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan pangan

Penyebabnya yaitu berkurangnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan oleh aktivitas ekonomi masyarakat terutama untuk pengembangan lahan perkebunan, permukiman, pembangunan infrastruktur ataupun industri. Data Statistik Pertanian menunjukkan bahwa selama Tahun 2013 s/d 2020, terjadi konversi lahan sawah menjadi lahan perkebunan maupun lahan non pertanian mencapai ± 9.556 Ha. Terakhir pada Tahun 2023 luas lahan baku sawah sebesar 7511,25 ha menurun dari luas 18.435 ha di Tahun 2013, dampaknya produksi padi juga ikut menurun.



c. Kerusakan kawasan pesisir dan abrasi pantai

Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memiliki cagar alam: kawasan hutan Pantai Timur mangrove yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 14/Kpts II/2003 dengan luas 4.126,60 ha. Unit pelaksana teknis cagar alam ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Balai Jambi dengan Mendahara dan Kuala Tungkal sebagai wilayah administrasi kabupaten. Kawasan ini telah dikembangkan sebagai kawasan ekowisata mangrove sejak Tahun 2009 meskipun diperlukan upaya tambahan dalam pelestarian dan pencegahan kerusakan kawasan ini akibat pendudukan manusia, konversi hutan mangrove menjadi tambak, kebun kelapa, dan sawah.

d. Masih Tingginya Kemiskinan dan stunting

Kemiskinan dan stunting merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu strategis. Kemiskinan dan stunting tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih cukup tinggi, pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin sebesar 33.120 jiwa (9,54%). Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 11 dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi, serta masih diatas rata-rata tingkat kemiskinan 12 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu lima Tahun terakhir dari Tahun 2020 sampai dengan 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat



berfluktuasi dan secara tren menunjukkan penurunan.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka prevalensi stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercatat sebesar 7,1 persen. Artinya, dari setiap 100 balita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekitar 7 balita mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan usianya.

Dalam kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat kemiskinan ekstrem, Tahun 2022 jumlah penduduk miskin ekstrem sejumlah 5.583 jiwa atau 1,64%. Penduduk miskin ekstrem dalam kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp.322.170/orang/bulan, dengan kata lain, penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum.

Kemiskinan perlu ditangani secara serius dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan kemiskinan yang terlalu lama akan menimbulkan permasalahan sosial baru, seperti memicu terjadinya tindak kriminal, tingkat pengangguran bertambah, kemunduran kualitas SDM karena banyak yang tidak mampu bersekolah lebih tinggi, dan angka kematian meningkat karena rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.



e. Ketimpangan infrastruktur antar wilayah

Terdapat tiga kecamatan yang masih cukup tertinggal dari sepuluh kecamatan lainnya dilihat dari sisi pembangunan, yaitu Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Renah Mendaluh. Adanya kesenjangan wilayah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut dapat ditunjukkan dengan indeks gini terakhir pada Tahun 2024, yaitu sebesar 0,291, angka tersebut menggambarkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kesenjangan pembangunan atas tiga kecamatan tersebut diatas, bisa dilihat dari ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan keberadaan industri. Ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan, jaringan telekomunikasi, perpipaan air bersih, dan jaringan listrik yang ada pada tiga kecamatan tersebut diatas masih minim, kemudian sarana dan prasarana pelayanan pendidikan seperti sekolah dasar dan sekolah tingkat lanjutan atas, dan pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan pustu belum cukup memadai. Majunya suatu daerah salah satunya diindikasikan dengan adanya industri yang berdiri di daerah tersebut, di Kec. Seberang Kota tidak terdapat industri, kemudian Kec. Kuala Betara hanya terdapat perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, dan Kecamatan Renah Mendaluh hanya terdapat satu pabrik pengolahan kelapa sawit.

f. Ketergantungan pada sektor primer

Struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini masih didominasi oleh sektor-sektor primer, khususnya pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat. Komoditas utama seperti kelapa, kelapa sawit, padi, dan hasil perikanan tangkap maupun budidaya menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten.



Meskipun sektor primer memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga ketahanan pangan, namun ketergantungan yang tinggi pada sektor ini menjadikan struktur ekonomi daerah kurang tahan terhadap gejolak eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, serta tekanan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.

Minimnya pengembangan sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa, perdagangan, ekonomi kreatif) juga menyebabkan nilai tambah dari hasil-hasil produksi pertanian dan perikanan masih rendah, serta terbatasnya diversifikasi ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

g. Permukiman Kumuh

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Layak Huni. Ini merupakan tindak lanjut komitmen daerah dalam rangka penyelesaian Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat dan Program 3 juta rumah dari Pemerintahan Presiden Prabowo, adapun target yang ditetapkan Tahun 2025-2029 sebanyak 1.750 unit rumah dari 3.520 unit rumah yang terdata pada aplikasi e-RTLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat per Februari 2025.

Sepanjang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 telah tertanganinya perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 2.971 unit rumah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

Tabel 4 Rekap Rumah Terbangun (MBR) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 - 2024

No	Kecamatan/Distrik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1	Tungkal Ilir	312	60	162	38	98	161	113	944
2	Kuala Betara	80	45	130	54	42	20	20	391
3	Betara	50	180	45	36	36	30	21	398



4	Bramitam	-	-	59	75	-	-	73	241
5	Pengabuan	-	-	15	-	-	97	20	132
6	Seberang Kota	-	-	15	10	15	50	4	94
7	Senyerang	-	-	10	13	43	37	12	115
8	Tebing Tinggi	65	30	65	30	130	8	28	326
9	Muara Papalik	-	105	95	-	29	10	-	239
10	Merlung	40	75	109	-	-	-	-	224
11	Tungkal Ulu	40	30	-	-	-	-	-	70
12	Renah Mendaluh	-	60	70	10	13	86	39	278
13	Batang Asam	-	-	37	-	-	-	-	37
	JUMLAH	587	449	712	268	325	630	268	2971

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat, Tahun

Pada Tahun 2024 telah tersusun dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) oleh Dinas Perkim KabupatenTanjung Jabung Barat, pendataan kawasan kumuh didapati seluas 174,61 ha pada 6 kecamatan 8 kelurahan / kawasan kumuh, sebagai berikut :

Tabel 5 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kab. Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Kawasan kelurahan di	Luas (ha)	Keterangan
1.	Tungkal Ilir	1. Sriwijaya	9,79	Ringan
		2. Tungkal II	40,7	Ringan
		3. Kpg. Nelayan	9,95	Ringan
2.	Merlung	4. merlung	8,2	Ringan
3.	Tebing tinggi	5. Tebing Tinggi	3,4	Ringan
4.	Pengabuan	6. Teluk Nilau	12,6	Ringan
5.	Kuala betara	7. Betara Kiri	29,34	Sedang
6.	Betara	8. Mekar Jaya	9.77	Ringan
Jumlah			123,75	

Sumber Data : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 71/Kep.Bup/Perakim/2024 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab.Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Luasan Kumuh Kabupaten di atas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71/Kep-Bup/PERAKIM/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai acuan kegiatan percepatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.



h. Rendahnya akses air bersih Perpipaan Berkelanjutan

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan air manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu.

Tabel 6 Distribusi dan Luas lahan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Kategori					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Kec. Batang Asam	25,022	22976,507	19553,643	33069,146	10922,604	86546,922
2	Kec. Betara	614,193	1850,896	1196,092	17563,106	17631,702	38855,989
3	Kec. Bram Itam	67,333	3048,391	3048,391	30205,998	24973,964	69637,927
4	Kec. Kuala Betara	14,781	1,262	136,155	136,155	19943,395	22119,813
5	Kec. Merlung	-	29,68	1787,767	21294,283	166,105	23277,835
6	Kec. Muara Papalik	74,673	74,673	2084,069	32224,243	113,847	34625,41
7	Kec. Pengabuan	309,331	3138,909	1633,441	14110,832	18891,077	38083,59
8	Kec. Renah Mendaluh	6,495	2344,968	8071,8	15185,172	138,421	25746,856
9	Kec. Seberang Kota	789,524	415,065	1193,504	2205,22	10211,995	14815,308
10	Kec. Senyerang	463,963	3953,882	4240,096	8802,779	38432,256	55892,976
11	Kec. Tebing Tinggi	518,395	901,405	2426,072	19427,203	11381,447	34654,522
12	Kec. Tungkal Ilir	1930,124	11,192	191,911	1650,855	9069,596	12853,678
13	Kec. Tungkal Ulu	554,376	460,075	1767,95	33118,809	4969,836	40871,046
	Kab. Tanjung Jabung Barat	5368,21	39260,81	55624,741	230881,866	166846,245	497981,872

Sumber : Buku Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

Tabel 6 di atas menunjukkan dari 497.981,872 Ha luas (lahan) jasa penyediaan air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 33,50 persen kategori sangat rendah, 46,36% kategori rendah, 11,17 persen kategori sedang, 7,88% kategori tinggi, dan 1,08% kategori sangat tinggi. Secara akumulasi jasa penyediaan air bersih dengan kategori rendah dan sangat rendah lebih besar (79,87%) dibanding



kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi (20,13%).

Sampai dengan Tahun 2024 SPAM Jaringan Perpipaan dilakukan oleh PDAM berjumlah sambungan rumah sebanyak 11.497 atau sebesar 14,33 persen dari jumlah rumah 80.226 unit.

1.4.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu Strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan. Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima Tahun mendatang.

Inventarisasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan lima Tahun ke depan. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima Tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Isu strategis merupakan suatu kondisi/perkembangan/peristiwa/trend yang terjadi di daerah dan berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan serta strategi-strateginya. Isu strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu strategis tersebut tidak selalu bermuatan atau bernuansa negatif. Isu strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat. Isu strategis yang akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan daerah ke depan, sumber isu strategis diklasifikasikan berdasarkan lingkupnya Internasional, Nasional maupun Regional.

**a. Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Internasional**

Isu strategis pembangunan daerah pada tingkat internasional akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan mencakup demografi global, geopolitik dan geaekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim yang secara rinci tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 7 Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Internasional

No	Isu Strategis pada Tingkat Internasional
1	Demografi Global
	o Perkembangan demografi global mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia
2	Geopolitik dan Geaekonomi
	o Potensi konflik geopolitik ke depan sejak Perang antara Rusia dan Ukraina akan meluas di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan
	o Krisis di berbagai sektor (Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber) memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan
3	Perkembangan Teknologi
	o Kecepatan perubahan teknologi (Internet of Things, blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence, Distributed Ledger dll) telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat
	o Kesiapan yang adaptif dari masyarakat terhadap perkembangan teknologi
4	Urbanisasi Dunia
	o Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota
5	Konstelasi Perdagangan Global
	o Kerja sama kawasan menciptakan hubungan perdagangan strategis
7	Pertumbuhan Kelas Menengah
	o Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru
8	Persaingan Sumber Daya Alam
	o Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses SDA (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang
9	Perubahan Iklim

**No Isu Strategis pada Tingkat Internasional**

- Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati (tiga krisis global) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari

Sumber : RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

b. Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Nasional

Isu strategis pembangunan daerah pada tingkat nasional akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan mencakup pembangunan sumberdaya manusia dan sosial budaya, pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, secara detail tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 8. Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Nasional

No	Isu Strategis pada Tingkat Nasional
1	Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya ○ Akses & kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan social ○ Kualitas pendidikan yang masih rendah ○ Belum meratanya akses pelayanan kesehatan
2	Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam ○ Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata ○ Rendahnya kontribusi UMKM & Koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi ○ Peningkatan akses energi yang belum merata & berkualitas ○ Masih tingginya tingkat pencemaran kerusakan lingkungan ○ Keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relative terbatas ○ Pembangunan infrastruktur yang masih jauh dibawah kebutuhan
3	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik ○ Belum meratanya kualitas pelayanan public Kesenjangan dan disparitas dukungan infrastruktur TI antardaerah (transformasi digital di tingkat pemerintah daerah) ○ Belum efektifnya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, K/L, daerah dalam jangka Panjang ○ Terbatasnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan & peningkatan kebutuhan Pembangunan dari sektor public pusat & daerah

Sumber : RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

**c. Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Regional****1) Strategi hilirisasi komoditas**

Salah satu isu strategis pembangunan tingkat regional di Provinsi Jambi, termasuk di dalamnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah rendahnya nilai tambah dari komoditas unggulan daerah akibat belum optimalnya strategi hilirisasi. Wilayah ini dikenal sebagai sentra penghasil kelapa, kelapa sawit, karet, pinang, dan hasil perikanan, namun sebagian besar komoditas tersebut masih dijual dalam bentuk bahan mentah (raw material) tanpa proses pengolahan lanjutan di dalam wilayah sendiri.

Kondisi ini menyebabkan daerah kehilangan potensi nilai tambah ekonomi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja di sektor industri, dan rendahnya kontribusi sektor sekunder terhadap struktur PDRB. Akibatnya, terjadi ketergantungan pada harga pasar komoditas global, serta lemahnya daya tawar petani dan nelayan dalam rantai pasok.

2) Tata kelola DAS dan kawasan pesisir

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan bagian penting dari sistem hidrologi dan ekologi pesisir timur Provinsi Jambi, yang meliputi Daerah Aliran Sungai Pengabuan dan Batanghari, serta memiliki garis pantai yang luas di sepanjang pesisir timur Sumatera. Kawasan ini memiliki fungsi strategis sebagai lumbung pangan, zona tambak dan perikanan, kawasan permukiman pesisir, serta pelabuhan niaga dan perikanan. Namun demikian, tata kelola DAS dan kawasan pesisir masih menghadapi berbagai tantangan serius yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor.

d. Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Daerah Prov. Jambi**1) Produktivitas Ekonomi dan Ketimpangan**

Produktivitas ekonomi di Provinsi Jambi dalam beberapa Tahun terakhir menunjukkan tren yang perlu menjadi perhatian dalam



perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat sebesar 4,66 persen, mengalami penurunan dibandingkan Tahun sebelumnya yang tumbuh 5,13 persen. Tren ini berlanjut pada Tahun 2024, di mana pertumbuhan ekonomi kembali turun menjadi 4,51 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap positif, perlambatan yang terjadi menunjukkan adanya tantangan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan stabilitas ekonomi secara berkelanjutan, khususnya di sektor-sektor strategis daerah.

2) Rantai nilai komoditas unggulan Provinsi Jambi

Provinsi Jambi memiliki potensi ekonomi yang signifikan dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang tercermin dalam kontribusi sektor terhadap PDRB Provinsi Jambi. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan pinang memainkan peran penting dalam perekonomian regional. Komoditas kelapa sawit sebagai subsektor perkebunan dengan volume produksi tertinggi mencapai 2.496,3 ribu ton, menjadikannya komoditas dengan kontribusi 17,8% terhadap PDRB Provinsi Jambi.

Sektor pertambangan, terutama komoditas batu bara, minyak bumi dan gas alam juga memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan Provinsi Jambi terutama melalui aktivitas ekspor. Meskipun mengalami penurunan dari 15,31 pada Tahun 2023 sektor pertambangan dan penggalian masih menempati nilai kontribusi terbesar kedua sebesar 13,41 pada Tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan dampak dari pendangkalan debit air pada Sungai Batanghari akibat musim kemarau yang memberikan dampak signifikan terhadap distribusi komoditas batu bara.

3) Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,



berkelanjutan, dan berdaya saing. Kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi masih menjadi tantangan utama dalam mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indeks 2-258 Bab II Gambaran Umum Daerah Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap Tahun nya. Namun demikian, capaian IPM pada Tahun 2024 masih terdapat ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan capaian IPM sebesar 70,77 dan capaian IPM ini baru masuk ke dalam kategori “Tinggi” dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah mencapai sebesar 72,01. Sedangkan pada tingkat kota, terdapat capaian IPM Kota Jambi yang telah mencapai sebesar 81,77 dengan kategori “Sangat Tinggi”, bahkan 70,77 dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan capaian IPM sebesar 72,01 dua capaian IPM tersebut berada di atas IPM Provinsi Jambi yaitu 74,36. Hal ini perlu disikapi untuk mewujudkan pemerataan IPM di Provinsi Jambi.

4) Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan hidup di Provinsi Jambi merupakan tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan berdampak langsung terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat. Kerusakan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan berkurangnya kawasan lindung menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan lintas sektor. Tekanan berbagai aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip kelestarian telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan perkebunan, pertanian, dan permukiman menyebabkan deforestasi, berkurangnya tutupan hutan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Kegiatan penebangan liar, pembukaan lahan tanpa izin, serta



lemahnya pengawasan terhadap perizinan semakin mempercepat laju degradasi kawasan hutan, termasuk kawasan hutan lindung dan konservasi. Selain itu, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang sering terjadi pada musim kemarau menimbulkan kerusakan ekosistem, polusi udara lintas wilayah, serta gangguan kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat.

5) Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Kinerja birokrasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas. Reformasi birokrasi yang telah diupayakan belum sepenuhnya menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik masih bervariasi antar perangkat daerah, dan belum seluruh unit pelayanan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terukur serta sistem pengaduan yang responsif.

e. Isu Strategis Pembangunan Daerah pada Tingkat Daerah

Isu strategis pembangunan daerah pada tingkat daerah akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan.

1) Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih rendah, kualitas sumberdaya manusia dapat ditunjukkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 72,01. Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 10 dari 11



kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi, serta masih dibawah rata-rata IPM Provinsi Jambi dan Nasional. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat cenderung mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun , hanya saja Tahun 2020 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Secara tren IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan.

2) Akses pendidikan dan kesehatan

Meskipun capaian pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan tren positif dalam beberapa Tahun terakhir, namun disparitas akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan antar wilayah masih menjadi tantangan strategis. Ketimpangan ini terutama dirasakan di kecamatan-kecamatan yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan layanan, seperti di wilayah hulu dan pesisir, yang memiliki keterbatasan infrastruktur dasar, tenaga pendidik dan kesehatan, serta sarana transportasi.

Dalam sektor pendidikan, terdapat sekolah-sekolah di wilayah terpencil yang masih kekurangan guru tetap, fasilitas belajar yang tidak memadai, serta rendahnya angka partisipasi murni terutama pada jenjang menengah. Sementara itu, di sektor kesehatan, beberapa desa masih sulit mengakses layanan dasar seperti imunisasi, persalinan yang ditangani tenaga medis, serta layanan gizi anak dan ibu hamil karena keterbatasan jarak, fasilitas, dan SDM kesehatan.

Isu ini menjadi krusial karena menyangkut pemerataan keadilan sosial dan hak dasar warga negara, sekaligus berdampak langsung terhadap capaian indikator pembangunan manusia, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan sekolah, prevalensi stunting, dan UHC (Universal Health Coverage). Jika tidak diatasi secara terstruktur, ketimpangan ini berisiko memperlebar jurang pembangunan antar wilayah dan menurunkan daya saing generasi muda di masa depan.



3) Nilai tambah produk unggulan / Hilirisasi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki berbagai komoditas unggulan daerah yang potensial, seperti kelapa, kelapa sawit, pinang, padi, serta hasil perikanan budidaya dan tangkap. Komoditas-komoditas tersebut selama ini menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Namun, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih didominasi oleh penjualan bahan mentah, sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh masyarakat dan daerah masih rendah.

Minimnya fasilitas industri pengolahan, keterbatasan teknologi pascapanen, lemahnya akses pemasaran, dan rendahnya kapasitas kelembagaan petani dan nelayan menjadi faktor utama penyebab rendahnya hilirisasi produk unggulan di daerah. Akibatnya, komoditas yang bernilai strategis tersebut tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, maupun kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

4) Akses air bersih

Akses terhadap air bersih yang layak dan aman merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta indikator penting dalam mendukung kesehatan, kualitas hidup, dan produktivitas masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini masih banyak wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menghadapi keterbatasan akses air bersih, khususnya di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah dengan kontur gambut atau rawa.

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Keterbatasan jaringan dan kapasitas sistem penyediaan air bersih (SPAM),
- Kualitas sumber air permukaan dan air tanah yang rendah, terutama akibat intrusi air laut, pencemaran limbah rumah tangga, serta air gambut yang bersifat asam,



- Belum optimalnya pengelolaan air bersih berbasis komunitas dan desa,
- dan terbatasnya investasi dan inovasi teknologi dalam pengelolaan air bersih di daerah sulit akses.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap peningkatan risiko penyakit berbasis lingkungan, rendahnya capaian sanitasi layak, serta ketimpangan pelayanan dasar antar wilayah. Selain itu, permasalahan air bersih juga berpotensi memperburuk kerentanan stunting, terutama pada rumah tangga miskin dan kelompok rentan.

5) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Meningkatnya jumlah penduduk berdampak kepada meningkatnya laju penggunaan sumberdaya alam, termasuk pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya.

Daya dukung (*carrying capacity*) adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Pertambahan jumlah penduduk akan diikuti pertambahan sarana prasarana, yang paling dasar adalah membutuhkan perluasan lahan sebagai wadah aktivitas untuk tumbuh dan berkembang. Apabila perkembangan tersebut tidak dikendalikan dengan baik maka dapat terjadi konversi lahan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi dan daya dukungnya yang akan berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat dua isu pokok yang menjadi perhatian yaitu



daya dukung jasa penyediaan air bersih dan daya dukung jasa penyedia pangan.

6) Daya Dukung Penyediaan Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan air manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu.

Tabel 9. Distribusi dan Luas lahan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Kategori					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Kec. Batang Asam	25,022	22976,507	19553,643	33069,146	10922,604	86546,922
2	Kec. Betara	614,193	1850,896	1196,092	17563,106	17631,702	38855,989
3	Kec. Bram Itam	67,333	3048,391	3048,391	30205,998	24973,964	69637,927
4	Kec. Kuala Betara	14,781	1,262	136,155	136,155	19943,395	22119,813
5	Kec. Merlung	-	29,68	1787,767	21294,283	166,105	23277,835
6	Kec. Muara Papalik	74,673	74,673	2084,069	32224,243	113,847	34625,41
7	Kec. Pengabuan	309,331	3138,909	1633,441	14110,832	18891,077	38083,59
8	Kec. Renah Mendaluh	6,495	2344,968	8071,8	15185,172	138,421	25746,856
9	Kec. Seberang Kota	789,524	415,065	1193,504	2205,22	10211,995	14815,308
10	Kec. Senyerang	463,963	3953,882	4240,096	8802,779	38432,256	55892,976
11	Kec. Tebing Tinggi	518,395	901,405	2426,072	19427,203	11381,447	34654,522
12	Kec. Tungkal Ilir	1930,124	11,192	191,911	1650,855	9069,596	12853,678
13	Kec. Tungkal Ulu	554,376	460,075	1767,95	33118,809	4969,836	40871,046
	Kab. Tanjung Jabung Barat	5368,21	39260,81	55624,741	230881,866	166846,245	497981,872

Sumber : Buku Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

Tabel 9 di atas menunjukkan dari 497.981,872 Ha luas (lahan) jasa penyediaan air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 33,50 persen kategori sangat rendah, 46,36% kategori rendah, 11,17 persen kategori sedang, 7,88% kategori tinggi, dan 1,08% kategori



sangat tinggi. Secara akumulasi jasa penyediaan air bersih dengan kategori rendah dan sangat rendah lebih besar (79,87%) dibanding kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi (20,13%).

7) Daya Dukung Penyediaan Pangan

Kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup adalah berupa pangan yang digunakan sebagai nutrisi dalam mempertahankan hidup. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok berupa pangan sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam yang satu kesatuan ekosistem. Tinggi rendahnya suatu ekosistem menyediakan jasa ditentukan oleh tipe atau jenis ekoregion. Potensi utama sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedele, kacang tanah, dan kacang hijau

Tabel 10. Distribusi dan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Kategori					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Kec. Batang Asam	977	1207	63427	18235	2701	86547
2	Kec. Betara	19	1346	25428	25428	6972	38856
3	Kec. Bram Itam	91	2951	33097	21196	12302	69638
4.	Kec. Kuala Betara	25	923	16669	7	4496	22120
5.	Kec. Merlung	-	131	11568	11413	166	23278
6.	Kec. Muara Papalik	4	97	24178	10233	114	34625
7.	Kec. Pengabuan	2793	2565	15463	5300	11963	38084
8.	Kec. Renah Mendaluh	39	485	13632	11452	138	25747
9.	Kec. Seberang Kota	139	1784	12493	90	310	14815
10.	Kec. Senyerang	3939	2706	21134	2349	25765	55893
11.	Kec. Tebing Tinggi	57	1291	23530	6732	3044	34655
12.	Kec. Tungkal Ilir	65	293	11331	295	870	12854
13.	Kec. Tungkal Ulu	17	63	31140	8308	1343	40871
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	8164	15842	303090	100701	70185	497982

Sumber: Buku Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan dari 497.982 Ha luas jasa ekosistem penyediaan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 14,09% kategori sangat rendah, 20,22% kategori rendah, 60,86% kategori sedang 3,18% kategori tinggi, dan 1,64% kategori sangat tinggi. Secara akumulasi jasa ekosistem penyediaan pangan dengan kategori rendah



dan sangat rendah (34,32%) masih dibawah kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi (65,68%), artinya secara umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih mampu menyediakan jasa ekosistem penyediaan pangan.

8) Pemerataan Pembangunan

Secara pengamatan terdapat tiga kecamatan yang masih cukup tertinggal dari sepuluh kecamatan lainnya dilihat dari sisi pembangunan, yaitu Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Renah Mendaluh. Adanya kesenjangan wilayah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut dapat ditunjukkan dengan indeks gini terakhir pada Tahun 2023, yaitu sebesar 0,316, angka tersebut menggambarkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kesenjangan pembangunan atas tiga kecamatan tersebut diatas, bisa dilihat dari ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan keberadaan industri. Ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan, jaringan telekomunikasi, perpipaan air bersih, dan jaringan listrik yang ada pada tiga kecamatan tersebut diatas masih minim, kemudian sarana dan prasarana pelayanan pendidikan seperti sekolah dasar dan sekolah tingkat lanjutan atas, dan pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan pustu belum cukup memadai. Majunya suatu daerah salah satunya diindikasikan dengan adanya industri yang berdiri di daerah tersebut, di Kec. Seberang Kota tidak terdapat industri, kemudian Kec. Kuala Betara hanya terdapat perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, dan Kecamatan Renah Mendaluh hanya terdapat satu pabrik pengolahan kelapa sawit.

f. Kecamatan Seberang Kota

Kecamatan Seberang Kota secara geografis terletak di bagian Barat Daya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Luas wilayah Kecamatan Seberang Kota adalah 121,29 Km². Desa/kelurahan yang berada di wilayah Kec.



Seberang Kota adalah: Kelurahan Tungkal V, Desa Teluk Pulau Raya, Desa Kuala Kahar, Desa Harapan Jaya, Desa Mekar Alam, Desa Tungkal IV Desa, Desa Muara Seberang, Desa Kuala Baru. Penduduk Kecamatan Seberang Kota Tahun 2023 tercatat sebanyak 9.223 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 4.798* jiwa dan penduduk perempuan 4.324* jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex ratio) adalah 111,48 yang berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dari 111,1 jiwa penduduk laki terdapat 100 jiwa perempuan. Persebaran Penduduk di Kecamatan Seberang Kotatertcatat 99,79 jiwa per Km.

Di Kecamatan Seberang Kota terdapat 10 Sekolah Dasar, 799 siswa dan 84 guru, pada tingkat SLTP terdapat 3 buah, 131 siswa dan 23 orang guru. Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Seberang Kota antara lain 1 puskesmas dan 10 puskesmas pembantu dan 31 unit posyandu. Sementara tenaga kesehatan tercatat sebanyak 5 orang dokter dan 42 orang bidan.

Sarana komunikasi dan transportasi yang baik akan mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kondisi sinyal operator seluler di sebagian besar wilayah Kecamatan Seberang Kota sudah cukup baik. Sebanyak 8 desa/kelurahan semua sudah terjangkau dengan kualitas baik. Keberadaan sarana ekonomi di wilayah Kecamatan akan mendukung pembangunan dan perkembangan wilayah. Kecamatan Seberang Kota mempunyai pasar sebanyak 5 pasar yang berada di Teluk Pulau Raya, Kuala kahar, Harapan Jaya, Tungkal V dan Tungkal IV Desa. Koperasi di daerah perdesaan memiliki peran dan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan desa khususnya dalam bidang perekonomian. Sampai dengan saat ini, Kec. Seberang Kota belum mendapatkan layanan air bersih perpipaan (PDAM), semua desa dalam Kecamatan Seberang Kota belum bisa dilalui dengan kendaraan roda empat.

g. Kecamatan Kuala Betara

Kecamatan Kuala Betara adalah salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi dengan



luas wilayah 214,21 Km². Desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kuala Betara adalah : Desa Sungai Gebar, Desa Sungai Dualap, Desa Betara Kanan, Kelurahan Betara Kiri, Desa Sungai Gebar Barat, Desa Sungai Dungun, Desa Tanjung Pasir, Desa Dataran Pinang, Desa Kuala Indah, dan Desa Suak Labu. Penduduk Kecamatan Kuala Betara Tahun 2023 tercatat sebanyak 14.026 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 7.094* jiwa dan penduduk perempuan 6.608* jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex ratio) adalah 107,4 yang berarti bahwa penduduk lakilaki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dari 107 jiwa penduduk laki terdapat 100 jiwa perempuan. Persebaran Penduduk di Kecamatan Kuala Betara tercatat 94 jiwa per Km², sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tercatat sebesar 3 jiwa.

Di Kecamatan Kuala Betara terdapat 21 Sekolah Dasar/MI, 1.100 siswa dan 132 guru, pada tingkat SMP/ MTs terdapat 8 buah, 236 siswa dan 34 orang guru, sementara itu pada tingkat SMA/MAN tercatat sebanyak 8 buah, dan 87 orang siswa. Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Kuala Betara antara lain 1 puskesmas dan 6 puskesmas pembantu dan 24 unit posyandu. Sementara tenaga kesehatan tercatat sebanyak 3 orang dokter 1 orang dokter gigi dan 37 orang bidan. Sarana komunikasi dan transportasi yang baik akan mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Jumlah menara BTS di Kecamatan Kuala Betara ada 1 menara yang tersebar di beberapa desa. Kondisi sinyal operator seluler di sebagian besar wilayah Kecamatan Kuala Betara sudah cukup baik. Sebanyak 10 desa semua sudah terjangkau dengan kualitas baik.

Keberadaan sarana ekonomi di wilayah Kecamatan akan mendukung pembangunan dan perkembangan wilayah. Kecamatan Kuala Betara mempunyai pasar sebanyak 3 pasar yang berada di Betara Kiri, Tanjung Pasir, dan Sungai Dualap. Koperasi di daerah perdesaan memiliki peran dan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan desa khususnya dalam bidang perekonomian. Sama seperti Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara sampai saat ini juga belum mendapatkan layanan air bersih perpipaan



(PDAM). Terdapat dua desa yaitu desa Dataran pinang dan desa Sei. Dualap belum bisa dilalui dengan kendaraan roda empat.

h. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berdaya saing. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam beberapa Tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan khususnya terkait tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya optimal.

Isu ini menjadi penting dan strategis karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta keberhasilan pelaksanaan program pembangunan lintas sektor. Tata kelola yang buruk berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya, tumpang tindih kebijakan, dan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

i. Pluralitas sosial budaya

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah yang memiliki tingkat pluralitas sosial budaya yang tinggi. Keberagaman agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat menjadi kekayaan sekaligus tantangan tersendiri dalam proses pembangunan daerah. Keberadaan berbagai kelompok etnis seperti Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, dan lainnya, yang hidup berdampingan secara harmonis, mencerminkan potensi integrasi sosial yang kuat, namun juga berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak dikelola dengan baik.

Pluralitas sosial budaya bukan hanya tantangan, tetapi juga merupakan modal sosial yang harus dioptimalkan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai luhur masyarakat Tanjung Jabung Barat.



1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip - prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan

dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai - nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja-sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksa. Pengukurankinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah.

Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat. Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan - perubahan di beberapa segmen atau sub sistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting*





system seharusnya sudah ditinggalkan, sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*SAKIP*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *SAKIP* ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dari penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 yang memiliki tujuan esensi dari *SAKIP* bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan, untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan, dan sasaran strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (*program dan kegiatan*) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus *SAKIP* diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara selaras setiap Tahun nya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut akan dikomunikasikan kepada para *stakeholders* dalam wujud *SAKIP*. *SAKIP* memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan



pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.

2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam Akuntabilitas Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2025. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, minimal sampai pada indikator.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKjIP*) Kabupten Tanjung Jabung Barat menyesuaikan dengan metode penulisan yang disajikan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian tersebut adalah sebagai berikut :

- ❑ Bagian Sampul dan Pengantar berisi sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik dan Ikhtisar.
- ❑ Bab I Pendahuluan berisi latar Belakang, Gambaran Umum Kabupaten Tanjab Barat, kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Daerah yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, isu strategis, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- ❑ Bab II Perencanaan Kinerja menyajikan ringkasan rencana strategis dan rencana kinerja / perjanjian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.
- ❑ Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi capaian kinerja, analisa dan evaluasi



capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Realisasi Anggaran.

- ❑ Bab IV Penutup berisi kesimpulan kinerja Tahun 2025 dan rekomendasi perbaikan kinerja kedepan.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Terkait RPJMD, Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

2.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1. VISI

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan rumusan umum untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, berkenaan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) Tahun 2021-2026 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Tahun 2005 – 2025 dirumuskan sebagai berikut:

MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah “**Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah**” yang dideskripsikan sebagai berikut:

- **BERKUALITAS**, Sumberdaya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.
- **Ekonomi** maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- **Religius**, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.
- **Kompetitif**, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.
- **Aman**, Suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.
- **Harmonis**, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin



hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat

2.2.2. MISI

Dari pernyataan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut, dirumuskan 5 (*Lima*) Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun 5 misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

2.2.3. TUJUAN

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 2021-2026 Tahun kedepan adalah

1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia ;



2. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok ;
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
4. Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan;
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

2.2.4. SASARAN

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut yakni :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
4. Meningkatnya akutanbilitas kinerja pemerintah
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
6. Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
7. Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan
8. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
9. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota

Berikut Penjabaran misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator target dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tabel dibawah ini :


Tabel 11. Penjabaran Misi, Tujuan Dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD 2026
MISI I	TUJUAN 1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,47
MISI II	TUJUAN 2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman	73,50
MISI III	TUJUAN 3	Terselenggaranya tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	59,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	72,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,76
		Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP
MISI IV	TUJUAN 4	Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan ekonomi	4,00%
		Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	70,00
MISI V	TUJUAN 5	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	Indeks Gini	0,250
			Indeks Infrastruktur	73.19

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah



direalisasikan dalam DPA (*Dokumen Pelaksanaan Anggaran*) dan telah mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah serta pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur pemerintah daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata pemerintahan yang baik, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Peraturan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut *Output* adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.

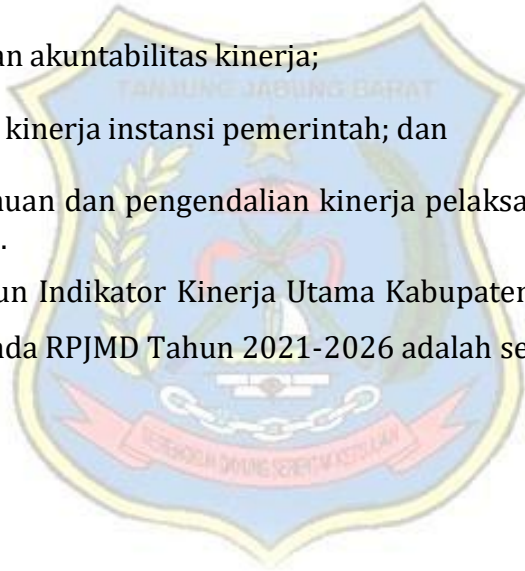
Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, dari kinerja Instansi Pemerintah disini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari



Visi, Misi, dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Perencanaan Tahun an;
3. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :





Tabel 12. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Bidang / Urusan
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran	- Pendidikan - Kesejahteraan Rakyat - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Tenaga Kerja - Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	2. Indeks Ketentraman	$IK = \frac{\text{Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum}}{\text{jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaporkan}} \times 100\%$	- Ketentraman dan Ketertiban Umum - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Perlindungan Masyarakat - Kesatuan Bangsa dan Politik - Sosial
3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	3. Indeks Reformasi Birokrasi	Komponen Pengungkit + Komponen hasil.	- Perencanaan - Pengawasan - Keuangan - Bagian Organisasi
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	4. Nilai SAKIP Kabupaten	30 % (Perencanaan) + 30 % (Pengukuran) + 15 % (Pelaporan) + 25 % (Evaluasi)	- Pengawasan - Perencanaan - Bagian Organisasi
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	5. Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsir}}{\text{Total Unsir yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	- Penanaman Modal - Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Keuangan - Kesehatan
6	Meningkatnya kinerja Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan	6. Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Penilaian BPK Perwakilan Provinsi Jambi	Keuangan



	Aset Daerah			
7	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	7. Laju Pertumbuhan Ekonomi	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan • Koperasi, Usaha Kecil dan menengah • Penanaman Modal • Perikanan • Kepemudaan dan olahraga • Pertanian • Bagian Ekonomi.
8	Terjaganya Kelestarian lingkungan hidup	8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = \frac{IPA+IPU+ITH}{3}$	• Lingkungan hidup • Kesehatan
9.	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	9. Indeks Gini	$GR = 1 - \sum fi[Y_i + Y_{i-1}]$ fi=Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i. Yi=Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i.	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Perhubungan.
		10. Indeks Infrastruktur	$II = (25\% \times RT \text{ akses air bersih}) + (25\% \times RT \text{ akses sanitasi}) + (25\% \times RT \text{ akses listrik}) + (25\% \times RT \text{ akses telepon})$	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kominfo • Bagian Sumber Daya Alam.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan gambaran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun an dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam



pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tugas pokok yaitu *“Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan perangkat daerah”*, yang merupakan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan dan menimbulkan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 44 (empat Puluh empat) jumlah perangkat daerah yang terdiri dari 31 dinas/badan dan 13 Kecamatan. Di dalam indikator kinerja utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak semua Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap IKU tersebut. Dari 44 Perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat sebanyak 23 OPD yang memiliki bidang/urusan sebagai penunjang sasaran strategis dari IKU Kabupaten sedangkan 8 dinas/badan dan 13 kecamatan sebagai pendukung tercapainya sasaran strategis dan IKU Kab. Tanjung Jabung Barat.

2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Pada dasarnya Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 harus menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan Tahun -Tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan Tahun -Tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap Tahun nya.

Tujuan Penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:


Tabel 13. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.78
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat	Nilai Ketentraman	88.00
3	Terselenggara nya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	72.00
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	70.00
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat	84.00
6	Meningkatnya Kinerja Penganggaran, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
7	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.59
8	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80.06
9	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	Indeks Gini	0,287
		Indeks Infrastruktur	83,448



Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga telah menindaklanjuti catatan dan Rekomendasi LKJiP triwulan II Kementerian PANRB yang diakes melalui situs <https://portalrb.menpan.go.id> dengan menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Perubahan dengan mempedomani RPMJD Tahun 2025-2029 akan tetapi untuk capaian kinerja pada LKJIP 2025 yang disusun masih menggunakan Perjanjian Kinerja sebelum perubahan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja perubahan belum sepenuhnya dijalankan pada Tahun 2025. Tindaklanjut atas catatan dan rekomendasi dari Kementerian PANRB ini menunjukkan komitmen dari Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat untuk terus memperbaiki implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat

Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Perubahan berdasarkan Hasil tindak Lanjut dari catatan dan Rekomendasi Kementerian PANRB adalah sebagai berikut :





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PERUBAHAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,14
2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Kemiskinan	8,37 - 9,04
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Prevalensi Stunting	6,65
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Indeks Kesejahteraan Sosial	55,00 – 55,50
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,050 – 3,130
6	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	70
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	71,90
8	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,30
9	Meningkatnya Kesenjangan Akses Infrastruktur dan Keuangan	Indeks Infrastruktur	81,90
10	Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,05
11	Meningkatnya Upaya Eksensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6,19



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.



Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam me-reviu kinerja organisasi pemerintah.



Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$CAPAIAN = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut

Tabel 14. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 - $\geq$ 100	Sangat Tinggi	
2	76 - 90	Tinggi	
3	66 - 75	Sedang	
4	51 - 65	Rendah	
5	$\leq$ 50	Sangat Rendah	

3.1.1 Capaian IKU

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel diatas selanjutnya digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pencapaian IKU Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 15. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja awal RPJMD	2025			Target Akhir (2026)	Capaian s/d 2021 terhadap Targer Akhir 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,54	72.78	73,00	100,30	69,47	105,08
2	Indeks Ketentraman	N/A	88.00	89,81	102,05	73,50	122,19
3	Indeks Reformasi Birokrasi*	47,88	72.00	76.07*	105,65	59,00	126,20
4	Nilai SAKIP Kabupaten	56,57	70.00	65.54	93,62	72,00	91,02
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,66	80.75	83.83	103,81	80,76	103,80
6	Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
7	Laju pertumbuhan Ekonomi	0,64%	4.59%	5,28 %	108,06	4,00%	124
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,22	80.06	71,69	89,54	70,00	102,41
9	Indeks Gini	0,281	0,287	0,297	96,63	0,250	84,17
10	Indeks Infrastruktur	62,15	83,448	78,97	94,63	73.19	107,89

* Hasil LHE RB Sementara



Jika dilihat dari tabel diatas, 10 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menunjukkan t i n g k a t capaian kinerja 89% atau lebih dan tingkat capaian terhadap target RPJMD 2021-2026 rata-rata diatas 90% kecuali Indeks Gini dengan capaian terhadap target akhir RPJMD 84,17%, bahkan pada 6 Indikator Kinerja Utama Bupati Tanjung Jabung Barat telah melebihi capaian 100% dari taget akhir RPJMD. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan dan kerja keras serta komitmen dari Bupati Tanjung Jabung Barat dan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran telah berhasil untuk menuntaskan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel diatas maka, 10 Indikator Kinerja Utama telah masuk dalam kategori Sangat Baik . Jika dilihat dari pencapaian diatas, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah bekerja secara maksimal. Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap melakukan perbaikan-perbaikan guna untuk terus meningkatkan kinerja sehingga berdampak lebih baik lagi kepada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja demi terwujudnya visi misi Bupati Tanjung Jabung Barat yang tertuang pada RPJMD Tahun 2021-2026. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 3. Capaian Kinerja Tahun 2025





3.2. ANALISA DAN EVALUASI KINERJA

Analisa dan evaluasi kinerja memberikan justifikasi dan penyelesaian tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang ditargetkan. Dalam laporan ini menyajikan capaian kinerja dari 9 (*Sembilan*) sasaran strategis yang dilihat dari indikator kinerjanya masing- masing.

SS 1

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia



Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 16. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Indeks Pembangunan Manusia

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,54	70,26	70,88	71,44	72.01	72.78	73,00	100,30	69,47
Rata-rata Capaian Kinerja										

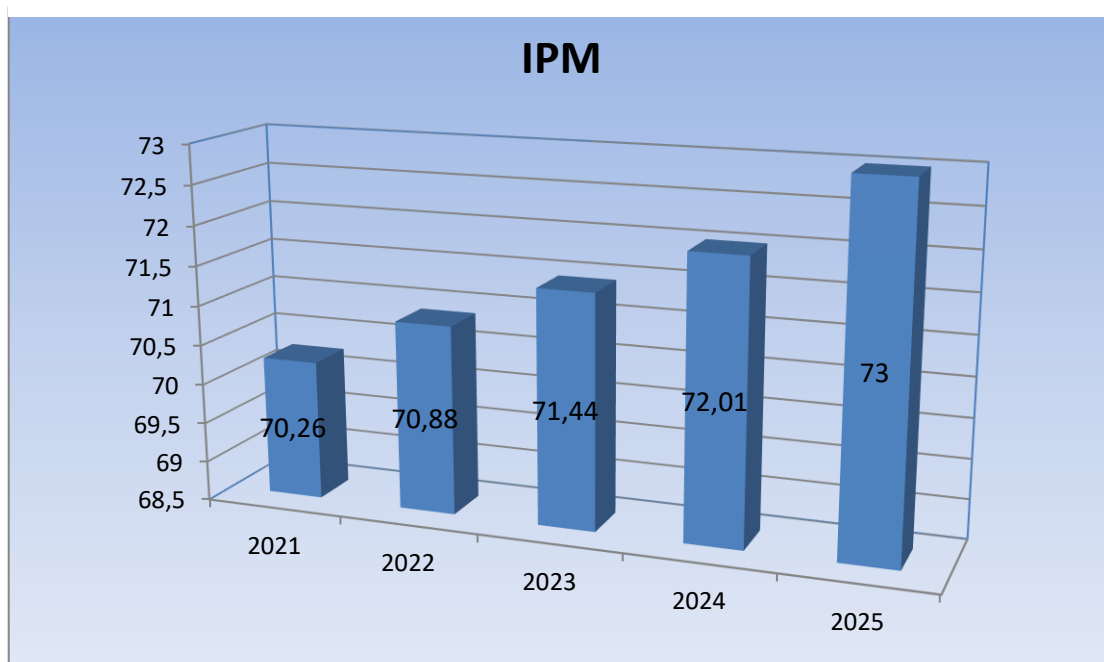
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanjung Jabung Barat.



Tabel 17. Perbandingan Nilai IPM Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Nilai IPM Nasional

Nilai IPM Kab. Tanjung Jabung Barat	Nilai IPM Provinsi Jambi	Nilai IPM Nasional
73,00	75,13	75,90

Grafik 4. Indek Pembangunan Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat



Sebelum Tahun 1970-an , pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal dalam memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

United Nations Development Programme dalam terbitan laporan Tahun nya (Human Development Index – HDI) menegaskan bahwa “ manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. HDI juga dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara dengan tingkat Gross National Income – GNI per kapita yang sama dapat menghasilkan



hitungan pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan ini dapat memicu perdebatan tentang prioritas kebijakan pemerintah (Human Development Reports, 2019).

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya sebagai alat dari pembangunan.

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (growth oriented), namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (people need oriented).

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). IPM merupakan indikator yang sangat



berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan status pencapaian.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Pembangunan manusia di Indonesia mengalami peningkatan setiap Tahun nya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dibandingkan Tahun sebelumnya yang sebesar 75,02. Peningkatan IPM Nasional Tahun 2025 didorong oleh semua indikator penyusunnya. Seluruh indikator mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024, yaitu pengeluaran riil per kapita per Tahun (yang disesuaikan) sebesar 461.000 rupiah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,22 Tahun , Harapan Lama Sekolah



(HLS) sebesar 0,09 Tahun , dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 0,32 Tahun . Di provinsi jambi dan Kab. Tanjung Jabung Barat pun IPM juga mengalami peningkatan.

Pembangunan manusia di Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan. Sejak Tahun 2018 status pembangunan manusia Provinsi Jambi sudah berada pada level “tinggi”. Selama 2020–2025, IPM

Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per Tahun , dari



72,29 pada 2020 menjadi 75,13 pada 2025.

Capaian Nilai IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Tahun 2025 IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 73,00% mengalami kenaikan sebesar 1,37% bila dibandingkan Tahun 2024 sebesar 72,01%. Dibandingkan dengan IPM Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 75,13% IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih tertinggal sebesar 2,13% dan masih berada pada peringkat ke 10 Kabupaten/Kota se – Provinsi Jambi.

Capaian IPM sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga



dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita yang secara rata-rata semakin membaik dari Tahun -ke Tahun .

Perkembangan IPM ditinjau dari komponen penyusunnya (Tabel 6.2) dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang positif pada semua komponen penyusun IPM. Pada Tahun 2025 dimensi umur yang panjang dan sehat mengalami kenaikan. Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 73,75 Tahun , meningkat 0,34 Tahun bila dibandingkan Tahun 2024. Pada dimensi pengetahuan, capaian pada Tahun 2025 terhadap indikator HLS dan RLS masing-masing meningkat sebesar 0,03 Tahun dan 0,22 Tahun , Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Riil Perkapita juga mengalami kenaikan di Tahun



2025 bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Ditinjau dari laju Pertumbuhan IPM, mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari Tahun ke Tahun dan pertumbuhan nilai IPM mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 1,37% pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024..

a. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)

Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kesehatan dengan indikatornya Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah Tahun yang dijalani oleh seseorang. Umur harapan hidup dipengaruhi oleh akses terhadap Kesehatan, keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, keadaan perekonomian masyarakat dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Pada Tahun 2025, data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil long form SP2020 untuk Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 73,75 Tahun dari target sebesar 68,49 Tahun. Ini berarti pada Tahun 2025, Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melebihi yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 realisasi Angka Harapan Hidup terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021, Angka harapan hidup adalah 68,12 Tahun, meningkat menjadi 68,43 Tahun pada Tahun 2022, kemudian meningkat lagi pada Tahun 2023 menjadi 68,67 Tahun, pada Tahun 2024 meningkat tajam menjadi 73,41 Tahun dan Tahun 2025 terus meningkat menjadi 73,75 Tahun. Dari data diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja untuk indikator Angka Harapan Hidup sebesar 107,68%.



b. **Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Grafik 5 Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah



Grafik diatas menyajikan perbandingan antara Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026. Berdasarkan grafik tersebut, realisasi HLS Tahun 2025 tercatat sebesar 12,71 Tahun , sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2026 ditetapkan sebesar 13,68 Tahun . Dapat terlihat bahwa capaian Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir RPJMD. Terdapat selisih sebesar 0,97 Tahun , yang menunjukkan masih adanya kesenjangan yang perlu dikejar pada periode terakhir pelaksanaan RPJMD. Apabila dihitung secara matematis menggunakan rumus $(\text{Realisasi} \div \text{Target Akhir}) \times 100\%$, maka tingkat pencapaian terhadap target akhir RPJMD baru mencapai sekitar 92,91%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tren HLS menunjukkan peningkatan dari Tahun ke Tahun , laju pertumbuhannya masih relatif tidak signifikan.

Grafik tersebut juga memperlihatkan bahwa peningkatan HLS membutuhkan akselerasi kebijakan, khususnya dalam memperluas akses pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, serta menstimulasi bagi kelompok masyarakat rentan yang berisiko tidak



melanjutkan pendidikan. Dengan sisa waktu satu Tahun menuju akhir periode RPJMD, diperlukan strategi yang lebih terarah dan berbasis data agar selisih capaian sebesar 0,97 Tahun dapat diminimalkan.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025 terealisasi sebesar **8,54 Tahun**, sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2026 ditetapkan sebesar **8,20 Tahun**. Realisasi Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPJMD sebelum periode perencanaan berakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 15 Tahun ke atas telah menempuh pendidikan lebih lama dari yang direncanakan dalam dokumen RPJMD.

Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pembangunan di sektor pendidikan, khususnya dalam meningkatkan akses dan partisipasi sekolah, menekan angka putus sekolah, serta memperluas layanan pendidikan kesetaraan. Peningkatan RLS ini juga menunjukkan adanya perbaikan keberlanjutan pendidikan masyarakat secara bertahap dan konsisten selama periode perencanaan.



Meskipun target telah terlampaui, tantangan ke depan adalah menjaga tren peningkatan tersebut serta memastikan bahwa tambahan lama sekolah sejalan dengan peningkatan mutu dan kompetensi lulusan. Dengan demikian, peningkatan RLS tidak hanya berdampak pada capaian kuantitatif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Peningkatan HLS dan RLS tersebut memang relatif sangat kecil, namun upaya peningkatan HLS dan RLS terus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal, penambahan dan peningkatan kualitas guru, pembiayaan beasiswa utusan daerah ke beberapa perguruan tinggi.



Selanjutnya strategi ke depan yang perlu dilakukan guna lebih meningkatkan angka HLS dan RLS adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
2. Singkronisasi keakuratan data pendidikan.
3. Optimalisasi penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk fokus menunjang kegiatan pembelajaran.
4. Penguatan kelembagaan satuan pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan).
5. Pemberian bantuan biaya personil kepada siswa khususnya siswa dengan ekonomi kurang mampu

c. Persentase tenaga kerja yang dilatih

Pada Tahun 2021, target Persentase Tenaga Kerja yang dilatih sebesar 78%. Realisasi sebesar 79,12%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,4%. Pada Tahun 2022, target Persentase Tenaga Kerja yang dilatih sebesar 80%. Realisasi sebesar 86,07%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 107,58%. Pada Tahun 2023, target Persentase Tenaga Kerja yang dilatih sebesar 82%. Realisasi sebesar 100%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 117%. Pada Tahun 2024, target Persentase Tenaga Kerja yang dilatih sebesar 84%. Realisasi sebesar 87,86%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 103%. Dan pada Tahun 2025, target Persentase Tenaga Kerja yang dilatih sebesar 85%. Realisasi sebesar 88,73%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 104,38%

Pada Tahun 2021, jumlah peserta yang dilatih sebanyak 144 orang dan jumlah peserta mendaftar sebanyak 182 orang. Pelatihan tersebut bersumber dari Dana APBN (BPVP Padang), Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Kementerian ESDM RI, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Tahun 2022, jumlah peserta yang dilatih sebanyak 144 orang dan jumlah peserta mendaftar sebanyak 165 orang. Pelatihan tersebut bersumber



dari Dana APBN (BPVP Padang), Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Kementerian ESDM RI, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Tahun 2023, jumlah peserta yang dilatih sebanyak 104 orang. Pelatihan tersebut bersumber dari Dana APBN (BPVP Padang), Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Kementerian ESDM RI, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Tahun 2024, Jumlah Peserta yang dilatih sebanyak 152 orang. Pelatihan tersebut bersumber dari Dana APBN (BPVP Padang), Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Kementerian ESDM RI, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Tahun 2025, jumlah Peserta yang dilatih sebanyak 315 orang, Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Kementerian ESDM RI, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tahun	Jumlah yang dilatih	Jumlah yang Mendaftar	Persentase
2021	144 orang	182 orang	79,12%
2022	144 orang	165 orang	86,07%
2023	80 orang	104 orang	130%
2024	152 orang	173 orang	103 %
2025	315 orang	355 Orang	104,38%

d. Meningkatkan Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius yang Terbina

Meningkatkan Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius yang Terbina adalah Perbandingan antara Peserta yang Berprestasi dengan Jumlah Seluruh Peserta yang Dibina. Adapun pemuda yang dimaksud adalah seluruh pemuda yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Kegiatan meliputi pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha.

Pada Tahun 2025, realisasi Sasaran 1 – pemuda berprestasi, mandiri, dan religius yang terbina – mencapai 37,34% dari target Tahun an atau sekitar 54%



dari target akhir RPJMD 2026. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dan stabilisasi program dibandingkan Tahun sebelumnya, meskipun masih di bawah target Tahun an. Peningkatan capaian didukung oleh pelaksanaan program pembinaan yang lebih terstruktur dan fokus pada pemuda kader, pelopor, wirausaha muda, dan pemuda mandiri, serta partisipasi pemuda yang mulai meningkat. Meskipun ketersediaan sumber daya seperti anggaran, SDM pembina, dan sarana pendukung cukup memadai, upaya lebih lanjut diperlukan agar program berjalan konsisten. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan tren pemulihan, namun untuk mencapai target akhir RPJMD 2026 sebesar 76-77%, perlu peningkatan intensitas pembinaan, perluasan partisipasi pemuda, serta penguatan monitoring dan evaluasi.

HAMBATAN DAN SOLUSI

A. Hambatan

Adapun hambatan dalam meningkatkan indeks IPM adalah sebagai berikut :

- 1) Posisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di daerah pasang surut sehingga berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesehatan lingkungan, masih terdapat masyarakat dengan akses pelayanan Kesehatan sulit terutama di daerah terpencil dan perbatasan, Rendahnya Partisipasi masyarakat mengikuti UKBM untuk meningkatkan Kesehatan, diantaranya Posyandu, Bina Keluarga Remaja, dll, Masih terdapat fasilitas Kesehatan dengan kuantitas sumber daya manusia belum merata dan Masih terdapat fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana dan alat Kesehatan belum sesuai standar.
- 2) Keterbatasan dan pemerataan tenaga pendidik, Pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana belum sepenuhnya optimal, Partisipasi siswa dalam kegiatan prestasi dan kompetisi masih rendah, Kapasitas kelembagaan pendidikan nonformal dan pelaku budaya belum merata, Kapasitas pelaku budaya dalam pelestarian budaya daerah masih terbatas



- 3) Kendala utama dalam pencapaian target Sasaran Strategis Pertama adalah ketidakseimbangan antara jumlah peserta pembinaan dengan jumlah pemuda yang berhasil mencapai kriteria berprestasi, mandiri, dan religius, khususnya pada awal Tahun . Pada Triwulan I dan II, sebagian besar kegiatan masih berfokus pada pembinaan dasar dan peningkatan partisipasi, sehingga output prestasi yang dihasilkan belum signifikan dan berdampak pada rendahnya persentase capaian kinerja. Selain itu, waktu pembinaan yang relatif singkat, perbedaan tingkat kemampuan awal peserta, serta keterbatasan intensitas dan kesinambungan pembinaan pada beberapa cabang olahraga dan kelompok pemuda juga menjadi faktor penghambat. Kendala lainnya adalah belum optimalnya sistem pendataan dan verifikasi capaian prestasi, yang menyebabkan sebagian hasil pembinaan baru dapat terakumulasi dan dilaporkan pada akhir Tahun , sehingga capaian kinerja cenderung terkonsentrasi pada Triwulan IV dan belum merata sepanjang periode pelaporan.
- 4) Masih terdapat kesenjangan antara kompetensi hasil pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

B. SOLUSI

Adapun solusi terhadap hambatan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam upaya perbaikan dan menciptakan lingkungan hidup sehat untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat, Meningkatkan pelayanan Kesehatan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan Kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan, Penggerakan dan Pemberdayaan masyarakat melalui upaya persuasif dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat Kesehatan, Melakukan rekrutmen dan pemerataan tenaga Kesehatan untuk memenuhi sumber daya manusia Kesehatan sesuai standar, Pemenuhan sarana prasarana dan alat



Kesehatan yang sesuai standar di fasilitas Kesehatan dan Meningkatkan Kerjasama dengan pihak swasta/stakeholder dalam upaya meningkatkan kualitas sarana prasarana Kesehatan serta mutu layanan kesehatan

- 2) **Penguatan pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik**, Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan sarana, Peningkatan pembinaan prestasi peserta didik, Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan dan komunitas budaya, Pengembangan kapasitas dan regenerasi pelaku budaya
- 3) Kendala dalam pencapaian target sasaran terutama disebabkan oleh belum seimbanginya peningkatan jumlah peserta pembinaan dengan output pemuda berprestasi yang dihasilkan, khususnya pada awal periode pelaporan. Fokus kegiatan pada tahap pembinaan dasar menyebabkan hasil prestasi belum dapat dicapai secara cepat dan terukur. Selain itu, keterbatasan waktu dan intensitas pembinaan, perbedaan kemampuan awal peserta, serta belum optimalnya kesinambungan pembinaan pada sebagian cabang dan kelompok pemuda turut mempengaruhi capaian kinerja. Kendala lainnya adalah proses pendataan dan verifikasi capaian prestasi yang masih bertahap, sehingga sebagian capaian baru terakumulasi pada akhir Tahun dan belum merata pada setiap triwulan.
- 4) Optimalisasi Program Pelatihan Kerja. Melakukan penyesuaian program pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja (demand driven), serta memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, dan dunia industri untuk meningkatkan relevansi dan daya serap lulusan pelatihan



Tabel 18. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Pembangunan Manusia

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
PENDIDIKAN					
1	Program Pengelolaan Pendidikan (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas)	Rp. 131.856.772.000	Rp. 119.172.344.092	Rp. 12.684.427.908	9,62%
KESEHATAN					
1	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 53.673.803.802	Rp. 50.977.144.485	Rp. 2.696.663.317,-	5,02
DINAS TENAGA KERJA					
1	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.800.469.000	Rp. 1.518.464.300	Rp. 282.004.700	15,66
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Program Pengembangan KapasitasDaya Saing Kepemudaan	Rp. 493.364.700,-	Rp. 373.106.282,-	Rp. 120.258.418,-	24,37
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp, 500,000,000,-	Rp. 494.882.500,-	Rp. 5.117.500,-	1,02
JUMLAH		Rp. 187.824.410.002	Rp. 172.535.941.659	Rp. 15.288.468.343	8,13

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif , efisien dan akuntabel dengan didukung oleh 5 program yaitu **program Program Pengelolaan Pendidikan** (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**, **Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja** dan **Program Pengembangan KapasitasDaya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan** yaitu sebesar 100,30% dengan efisiensi anggaran 8,13%. Ini membuktikan adanya sedikit efisiensi dalam pelaksanaan program-program untuk mencapai sasaran kinerja Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif , efisien dan akuntabel



SS 2

Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat



pada sasaran ini mempunyai 1 (satu) Indikator Utama yaitu Indeks Ketentraman dengan Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 19. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indeks Ketentraman

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Ketentraman	-	53,00	59,00	86,64	87,95	88,00	89,81	102,05%	73,50
Rata-rata Capaian Kinerja										

Sumber : Penilaian Mandiri Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Indeks Ketenraman terdiri dari sepuluh variabel yaitu kesiapsiagaan bencana, risiko bencana, pemenuhan terhadap kebutuhan biologis dan fisiologis, pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan pengembangan diri, kebebasan politik dan pemikiran, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, kriminalitas, kekerasan komunal dan kekerasan negara-masyarakat.



a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Target nilai Indeks ketentraman pada Tahun 2025 ini adalah sebesar 70,50% sedangkan untuk realisasi nilai indeks Ketentraman sebesar 89,81%. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian melebihi dari pada target yang telah ditentukan. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian pelanggaran Perda dan gangguan trantibum dapat diselesaikan dengan baik.

- a. Realisasi pencapaian indeks ketentraman berdasarkan formulasi di Tahun 2022 dapat dilihat pada formulasi dibawah ini :

$$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum}}{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{83}{83} \times 100 \% = 100 \%$$

- b. Realisasi pencapaian indeks ketentraman berdasarkan formulasi di Tahun 2023 dapat dilihat dibawah ini :

$$= \frac{\text{Jumlah Penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban}}{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban}} \times 100$$

$$= \frac{188}{217} \times 100 \% = 86,64 \%$$

- c. Realisasi pencapaian indeks ketentraman berdasarkan formulasi di Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran ketentraman \& ketertiban umum}}{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{73}{83} \times 100 \% = 87,95 \%$$

- d. Realisasi pencapaian indeks ketentraman berdasarkan formulasi di Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran ketentraman \& ketertiban umum}}{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{97}{108} \times 100 \% = 89,81 \%$$

- e. Adapun data penunjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 20 Data Pengaduan Dan Pelanggaran Perda Tahun 2022

NO	PELANGGARAN PERDA	PERDA YANG DILANGGAR	JUMLAH
1.	Pedagang kaki Lima	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005.	25
2.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015	2
3.	Protokol Kesehatan Covid-19	Perda Kab. Tanjab Barat No.4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19.	21
4.	Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	Perda No. 09 Tahun 2016 – Pelarangan Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	15
5.	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	16
6.	Pengguna Zat Adiktif (Lem)	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	4
JUMLAH			83

Tabel 21 Data Pengaduan Dan Pelanggaran Perda Tahun 2023

NO	PELANGGARAN PERDA	PERDA YANG DILANGGAR	JUMLAH
1.	Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021	29
2.	Pelarangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2016	5
3.	Ketertiban Umum (PKL,ODGJ,Anaka Lem)	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 Tahun 2005	179
4.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015	5
JUMLAH			217



Tabel 22. Jumlah Pengaduan Dan Pelanggaran Perda Tahun 2024

NO	PELANGGARAN PERDA	PERDA YANG DILANGGAR	JUMLAH
1.	Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021	9
2.	Pelarangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2016	12
3.	Ketertiban Umum (PKL, ODGJ, Anak Lem)	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 Tahun 2005	54
4.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2024, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015	7
5.	Bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2002	1
JUMLAH			83

Tabel 23. Jumlah Pengaduan Dan Pelanggaran Perda Tahun 2025

NO	PELANGGARAN PERDA	PERDA YANG DILANGGAR	JUMLAH PELANGGARAN	Keterangan	
				Selesai	Tidak Selesai
1	Bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2001	3	3	
2	Pelanggaran Prostitusi dan Perbuatan Asusila	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2016	20	20	
3	Ketertiban Umum	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005	59	49	10
4	Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021	12	12	
5	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024	8	8	



6	Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024	6	5	1
	JUMLAH		108	97	11

2. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Realisasi capaian indeks ketentraman Tahun 2025 adalah sebesar 89,81 %. Terdapat 97 Pengaduan Pelanggaran Perda yang diselesaikan dari sejumlah 108 Pelanggaran Perda pada Tahun 2025. Realisasi capaian Tahun 2024 adalah sebesar 87,95 % sedangkan Tahun 2023 sebesar 86,63 % dan pada Tahun 2022 sebesar 100 %. Terdapat perbedaan capaian realisasi pada Tahun 2022 dan Tahun 2023. Dimana pada Tahun 2022 realisasi yang dicapai lebih besar dengan nilai 100 % yang berarti semua jenis pelanggaran yang terjadi dapat diselesaikan.

Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2022 jumlah pelanggaran yang dilaporkan semua dapat diselesaikan, sedangkan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2024 ada sejumlah pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan / masih dalam upaya penyelesaian. Selain itu penyebab terjadinya perbedaan yang cukup signifikan karena untuk perhitungan / formulasi indeks ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan pencatatan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaporkan dengan lengkap selama Tahun 2022 untuk semua jenis laporan pelanggaran.

Pencatatan Tahun 2022 hanya sebatas jumlah yang dilaporkan secara langsung ke kantor Satpol PP. sedangkan untuk Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 sudah dilakukan pencatatan jumlah laporan pelanggaran Perda baik melalui laporan langsung, lewat telepon, whatsapp atau media social. Pada Tahun 2025 Satpol PP telah memiliki nomor layanan aduan masyarakat yang aktif setiap hari 24 jam.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target dalam RPJMD dan Renstra

Hasil capaian nilai indeks ketentraman Tahun 2025 jika dibandingkan dengan



target RPJMD dan Renstra, maka dapat dilihat bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ingin dicapai. Target Tahun 2025 sebesar 70,50% sedangkan capaian realisasi sebesar 89,81 %.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Tidak ada perbandingan capaian nilai indeks ketentraman Tahun 2025 dengan standar nasional.

b. Faktor Hambatan dan Solusi

1. Hambatan

Ada beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja untuk indeks ketentraman diantaranya sebagai berikut :

- a. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga sebelum melakukan penindakan perlu disosialisasikan terlebih dahulu serta dilakukan hanya tindakan non yustisi.
- b. Belum meratanya sosialisasi Perda dan Perkada hingga di Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu juga penting diadakan sosialisasi bagi pelajar di sekolah sekolah.
- c. Kurangnya papan himbauan Perda seperti papan himbauan perda Trantibum bagi PKL dan perda larangan bongkar muat serta Perda lainnya.
- d. Masih kurangnya sinergisitas antara satpol PP dan Satuan perlindungan masyarakat dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di sekitar lingkungan
- e. Masih kurangnya jumlah PPNS SatPol PP dalam melaksanakan Penegakkan Perda melalui Tindakan Yustisi dan Proses Tindak Pidana Ringan.

2. Solusi

Adapun solusi yang dapat kami sampaikan terkait laporan kinerja untuk indeks ketentraman yakni sebagai berikut :

- a. Penugasan kepada seluruh anggota piket maupun patroli untuk melakukan pencatatan setiap kejadian pelanggaran Trantibum baik dilaporkan masyarakat



secara langsung, laporan melalui WhatsApp, media social ataupun pelanggaran Trantibum yang ditemui disaat anggota SatPol PP melakukan patroli.

- b. Memberikan respon cepat untuk menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Penyelesaian masalah pelanggaran Peraturan daerah serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum perlu dilakukan penanganan yang tegas melalui tindakan Yustisi lewat proses Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) SatPol PP dengan melibatkan dan bekerjasama dengan Korwas Polres Tanjab Barat, Kejaksaan dan Pengadilan.

Tabel 24. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Ketentraman

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	4.957.842.200	4.834.909.997	122.932.203	2,48
2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	275.903.000	233.189.382	42.713.618	15,48
JUMLAH		5.233.745.200	5.068.099.379	165.645.821	3,27

Pada tabel diatas dapat dilihat ada ada 2 kegiatan yang menunjang indikator indeks ketentraman yakni **Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota.**

Anggaran yang digunakan disesuaikan dengan keperluan sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran, untuk kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum terdapat anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp 122.932.203. sedangkan untuk kegiatan Penegakan Perda dan



Peraturan Bupati/walikota terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 42.713.618,- Pada Tahun 2025 untuk anggaran standar pelayanan minimal sebesar RP 15.000.000,- tidak digunakan karena tidak ada warga yang terkena dampak akibat Penegakkan Perda dan Perkada

Adapun kegiatan penegakan Perda dan Perbup/walikota meliputi sosialisasi penegakan Perda dan Perkada, penanganan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta pengawasan atas kepatuhan penegakan Perda dan Perkada.





SS 3

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel



Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien.

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB sebagai instrumen evaluasi kinerja birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	47,88	51,59	54,80	49,73	71,88	72,00	76,07	105,65	72,00
Rata-rata Capaian Kinerja										

Sumber : LHE KemenPAN&RB, Inspektorat, Bapperida, Bagian Organisasi Setda. Kab. Tanjab barat

**Tabel 26.** Perbandingan Indeks RB Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Indeks RB Nasional

Nilai RB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025	Nilai RB Nasional Kab/Kota Tahun 2025
76.07	

Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai pilar utama dalam transformasi tata kelola pemerintahan daerah. Upaya ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban terhadap instruksi pemerintah pusat, melainkan sebuah langkah fundamental untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui komitmen yang kuat, reformasi ini diarahkan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara di lingkungan kabupaten.

Pada Tahun evaluasi 2025, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil mencatatkan pencapaian yang sangat menggembirakan pada Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan raihan nilai sebesar **76,07** dengan Predikat BB (Sangat Baik). Capaian ini merupakan bukti nyata dari kerja keras kolektif seluruh elemen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan delapan area perubahan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan perolehan Tahun sebelumnya yang tercatat sebesar **71,88**. Kenaikan sebesar **4,19 poin** ini mencerminkan adanya akselerasi perbaikan dalam sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan.

Pentingnya Indeks Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat dipandang sebelah mata. Indeks ini berfungsi sebagai barometer kesehatan organisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Nilai RB yang tinggi menjadi indikator bahwa birokrasi di Tanjung Jabung Barat telah meminimalkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta telah mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik



(*good governance*).

Selain sebagai instrumen evaluasi internal, Indeks RB yang baik juga berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Semakin tinggi indeks yang diraih, semakin besar pula keyakinan masyarakat bahwa pemerintah daerah hadir dengan sistem yang efisien dan transparan. Hal ini menjadi modal sosial yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjalankan program-program pembangunan strategis lainnya.

Menyikapi tren positif ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap waspada terhadap tantangan birokrasi di masa depan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Pemkab Tanjung Jabung Barat melalui Bagian Organisasi Setda telah menginisiasi kegiatan pendampingan Reformasi Birokrasi secara masif bagi seluruh perangkat daerah yaitu



dengan mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Pembinaan dan Pendampingan SAKIP Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 di Hotel ODU Weston Kota Jambi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semangat perubahan tidak hanya berhenti di level sekretariat daerah, tetapi meresap hingga ke unit kerja terkecil.

Kegiatan pendampingan ini dirancang secara khusus untuk memberikan pemahaman teknis mengenai pemenuhan data dukung serta implementasi nyata dari rencana aksi RB. Melalui pendampingan ini, setiap perangkat daerah dibimbing untuk melakukan inovasi dalam penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi pelayanan.

Harapan besar dari kegiatan pendampingan ini adalah terciptanya standardisasi kinerja yang unggul di seluruh organisasi perangkat daerah. Dengan adanya bimbingan yang terarah, diharapkan hambatan-hambatan

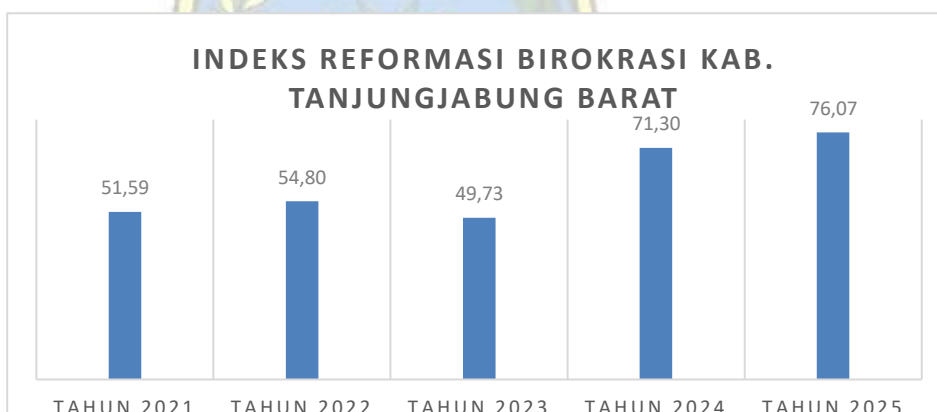


administratif yang selama ini menjadi kendala dapat teratasi dengan solusi yang aplikatif. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan setiap perangkat daerah mampu menjadi motor penggerak perubahan di instansinya masing-masing.

Melalui komitmen pendampingan yang berkelanjutan ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimis dapat meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di Tahun -Tahun mendatang ke level yang lebih tinggi. Target menuju kategori "Memuaskan" bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang realistis melalui kerja sama yang sinergis. Peningkatan nilai indeks di Tahun berikutnya akan menjadi bukti bahwa reformasi yang dilakukan bersifat substantif, bukan sekadar administratif.

Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2021 sd Tahun 2025 dapat dilihat pada Diagram dibawah ini.

Grafik 6. Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tanjungjabung Barat



Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 mendapatkan kategori **BB** dengan nilai 76.07. Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Perkembangan rincian hasil evaluasi reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten



Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dan 2025

No	Penilaian	Bobot	2024	2025
A	RB General	100	63.93	67,99
B	RB Tematik	20	7.37	8,08
C	Indeks RB	120	71.3	76.07
			BB	BB

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat, LHE KemenPANRB

Rekomendasi dan Solusi

1) Rekomendasi

- Mempertajam rencana aksi yang disusun agar dapat mencapai sasaran kegiatan utama.
- Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada baseline Tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024).
- Terus memastikan Rencana aksi yang disusun telah mendapat persetujuan dari Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan RB Internal.
- Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama.
- Memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan.
- Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.
- Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi;

2) Solusi

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengadakan Pendampingan dalam penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik Tahun 2025.
- Perangkat Daerah Penanggung Jawab RB General dan RB Tematik akan berkoordinasi Aktif dengan Kementerian/Lembaga penilai RB General dan RB Tematik.



Tabel 28. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

NO	PROGRAM/KEGI ATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Rp. 202.559.200	Rp. 167.763.750	Rp. 34.795.450	17,17%
2	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 1.074.950.000	Rp. 195.189.000	Rp. 879.761.000	81,84%
	JUMLAH	Rp. 1.277.509.200	Rp. 362.952.750	Rp. 914.556.450	71,58%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif , efisien dan akuntabel dengan didukung oleh 2 program yaitu **program peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi** yaitu sebesar 105,65% dengan efisiensi anggaran 71,58%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana.



SS 4

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah

Tabel 29. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Nilai SAKIP Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP Kabupaten	56,57	57,48	60,97	62,02	64,68	70,00	65,54	93,62	72,00
Rata-rata Capaian Kinerja										

Sumber : LHE KemenPANRB, Bagian Organisasi, Bapperida, Inspektorat

Tabel 30. Perbandingan Nilai SAKIP Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Nilai SAKIP Nasional

Nilai SAKIP Kab. Tanjung Jabung Barat	Nilai SAKIP Provinsi Jambi	Rata-rata Nilai SAKIP Kab/Kota Seluruh Indonesia
65,54	69,49	64,89

Tabel 31. Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, 2024 dan 2025

No	Komponen Penilaian	Bobot	2023	2024	2025
A	Perencanaan Kinerja	30	21,23	21,13	21,28
B	Pengukuran Kinerja	30	16,28	17,37	17,37
C	Pelaporan Kinerja	15	11,43	11,51	11,51
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,08	14,67	15,38
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,02	64,68	65,54
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B

Sumber : Hasil Evaluasi KemenPAN&RB 2025

**Tabel 32. Kategori Penilaian SAKIP**

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup Baik
C	>30-50	Agak Kurang
D	0-30	Kurang

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini tercermin dalam upaya berkelanjutan untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh lini organisasi. SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ruh dari efektivitas birokrasi yang berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya nilai SAKIP bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak pada perannya sebagai alat kendali untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran atau program yang tidak tepat sasaran (*mismanagement*). Dengan nilai SAKIP yang semakin baik, pemerintah daerah memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menunjukkan bahwa kinerja birokrasi telah berjalan secara efisien. Hal ini juga menjadi parameter kepercayaan bagi pemerintah pusat atas kinerja Pemerintah Daerah khususnya di Kab. Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh Nilai SAKIP sebesar 65,54 dengan predikat B. Capaian tersebut meningkat 0,86 poin dari Tahun 2024 dengan nilai 64,68. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dibandingkan Tahun -Tahun sebelumnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. selain itu, nilai SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Juga lebih tinggi dari rata-rata nilai SAKIP Kab/Kota seluruh Indonesia dengan Nilai 64,89.

Peningkatan nilai SAKIP tersebut didukung oleh semakin baiknya



keselarasan antara dokumen perencanaan kinerja dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja utama telah disusun secara lebih terukur dan relevan terhadap sasaran strategis, sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Selain itu, proses pengukuran dan pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara lebih sistematis dan didukung oleh pemanfaatan data kinerja yang lebih akurat.

Meskipun demikian, hasil evaluasi SAKIP juga menunjukkan masih adanya beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada penguatan evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu terus diperkuat agar dapat memberikan nilai tambah dalam mendorong peningkatan kinerja instansi secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan penerapan SAKIP. Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas indikator kinerja yang berorientasi outcome, penguatan cascading kinerja hingga tingkat individu, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Selain itu, bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peningkatan Implementasi SAKIP salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Pembinaan dan Pendampingan SAKIP Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah



Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 di Hotel ODU Weston Kota Jambi. Kegiatan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Pembinaan dan Pendampingan SAKIP bagi Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Barat tersebut dihadiri oleh 31 perangkat

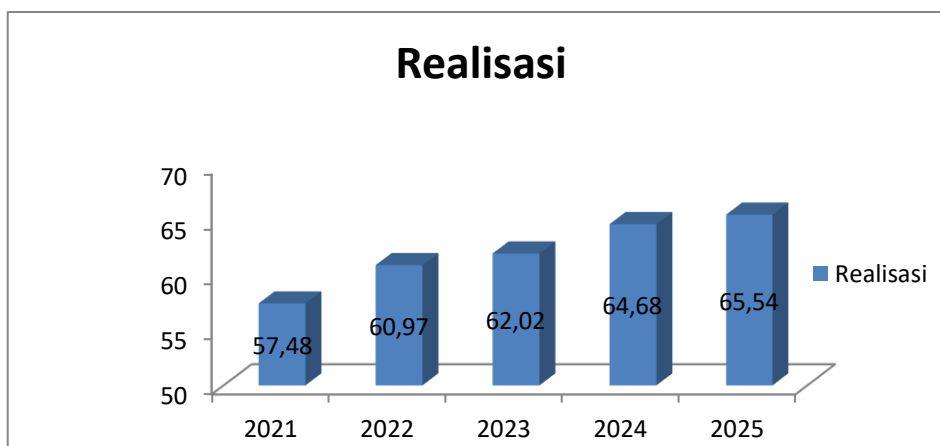


daerah dan 13 kecamatan dengan narasumber dari Kementerian PANRB yaitu **Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan bapak Akhmad Hasmy, AK dan Pengelola data dan Informasi Kementerian PANRB ibu Chafidloh Mufidah.** melalui pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, Pemkab Tanjung Jabung Barat berharap nilai SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat terus meningkat pada Tahun -Tahun berikutnya. Peningkatan ini tidak hanya menjadi target administratif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah..

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat untuk Pengembangan SAKIP berbasis elektronik yaitu Aplikasi E-SAKIP dan telah melakukan Upgrade Aplikasi untuk meningkatkan Fungsi Aplikasi E SAKIP Kabupaten dalam pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dengan capaian Nilai SAKIP tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat

Grafik 7. Nilai Sakip Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 s/d 2025





Rekomendasi dan Solusi

Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh KemenPANRB melalui Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2025 dan solusi atau/tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1) Rekomendasi

- a) Memastikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi telah menyajikan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil serta menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan.
- b) Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- c) Mereviu kembali penetapan target setiap Perangkat Daerah dengan memastikan seluruh target kinerja dapat dicapai, menantang, dan realistis. Selain itu memastikan juga penetapan target pada Perangkat Daerah dapat mendukung pencapaian target level Pemda;
- d) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- e) Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- f) Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.



- g) Menyampaikan IKU yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah terbaru dan dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi penghitungan yang relevan untuk setiap indikator kinerja melalui esr.menpan.go.id;
- h) Memaksimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja untuk melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan) dan untuk menyampaikan kinerja PD sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran dan transparansi kepada publik;
- i) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- j) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.
- k) Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dan menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja Tahun -Tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- l) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja Tahun berikutnya;
- m) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan



manajemen kinerja secara berkelanjutan;

- n) Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- o) Menyusun kebijakan reward dan punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

2) Solusi

- a) Melakukan reviu menyeluruh terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah oleh APIP dan Bapperida Termasuk dalam reviu menyeluruh terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah oleh APIP dan Bapperida;
- b) Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target Tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya;
- c) Bagian Organisasi telah Melakukan Upgrade untuk Menyempurnakan Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025
- d) Bagian Organisasi dalam melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah mengacu pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 untuk menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target Tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan



- pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
- e) Bagian Organisasi melaksanakan desk terhadap Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Laporan Kinerja KemenPANRB
 - f) Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah pada Tahun sebelumnya telah dijadikan salah satu instrument untuk menentukan besar atau kecilnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja di Perangkat Daerah 2. Pemanfaatan aplikasi SIMEKA sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja yang menjadi aspek penentu dalam memberikan Reward and Punishment. 3. Tersedinya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil 4. Tersedianya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara 5. Pemanfaatan aplikasi integrated Mutasi (I-Mut) dalam proses Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Kenaikan Jenjang Jabatan, Pengembangan Kompetensi dan Mutasi sesuai Regulasi dari BKN. 6. Pemanfaatan e-Kinerja dalam penentuan Target Kinerja kedepa
 - g) Melakukan penyempurnaan instrumen dan metodologi evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih terukur dan berbasis indikator kinerja yang relevan. 2. Melaksanakan reviu internal atas hasil evaluasi untuk memastikan kesesuaian antara penilaian dan kondisi riil unit kerja. 3. Memasukkan target capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah ke dalam Sasaran Kinerja tidak hanya pada Inspektur, tetapi juga kepada seluruh Inspektur Pembantu (Irban) sesuai wilayah binaannya dst. 4. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.



- h) Menyusun daftar monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh Perangkat Daerah. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulanan/semesteran) terhadap progres tindak lanjut. 3. Menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4. Memberikan teguran atau rekomendasi percepatan kepada PD yang belum menindaklanjuti hasil evaluasi.
- i) Mengoptimalkan implementasi Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang memberikan tambahan besaran TPP bagi OPD dengan nilai SAKIP kategori A dan BB berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat. 2. Pada akhir Desember 2025, telah dilaksanakan pemberian reward kepada OPD dengan nilai SAKIP terbaik versi Inspektorat, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan akuntabilitas kinerja. 3. Menambahkan indikator persentase capaian tindak lanjut (TL) atas hasil pemeriksaan sebagai salah satu komponen pertimbangan dalam pemberian reward, sehingga tidak hanya berbasis nilai SAKIP, tetapi juga pada tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi pengawasan. 4. Melakukan publikasi atas OPD berprestasi sebagai bentuk transparansi dan pembelajaran bersama. 5. Menetapkan mekanisme pembinaan khusus bagi OPD dengan nilai rendah dan/atau persentase TL yang belum optimal.

Tabel 33. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Sakip Kabupaten

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
1	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Rp. 202.559.200	Rp. 167.763.750	Rp. 34.795.450	17,17%



2	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 1.074.950.000	Rp. 195.189.000	Rp. 879.761.000	81,84%
	JUMLAH	Rp. 1.277.509.200	Rp. 362.952.750	Rp. 914.556.450	71,58%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah** dengan didukung oleh program Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi yaitu **sebesar 93,62%** dengan efisiensi anggaran **71,58%**





SS 5

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pada sasaran ke 5 (Lima) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai 1 (Satu) indikator utama Indikator dengan capaian kinerja sebagaimana penjelasan pada tabel dibawah ini :



Tabel 34. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Kepuasan Masyarakat	80,66	81,45	81.39	79.98	83.60	80.75	83.83	103.81%	80,76
Rata-rata Capaian Kinerja										

Sumber : Bagian Organisasi Setda kab. Tanjung Jabung Barat, Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat oleh Universitas Islam Negeri Jambi Tahun 2025

Tabel 35. Perbandingan Nilai IKM Kab. Tanjung Jabung Barat dengan IKM Provinsi Jambi

Nilai IKM Kab. Tanjung Jabung Barat	Nilai IKM Provinsi Jambi
83.83	86,961

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Jambi dalam untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat seperti Tahun 2024. Survei dilakukan secara periodik



dengan mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala *Likert* ini dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Salah satu media yang digunakan ialah layanan google form.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan survei terhadap seluruh Perangkat daerah dan Kecamatan di kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh nilai IKM sebesar 83,83 meningkat 0,23 dari Tahun 2024 dengan nilai.83,60. peningkatan tersebut didukung oleh tindaklanjut oleh Perangkat Daerah terhadap rekomendasi yang telah disampaikan oleh tim Survei dari UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi. Beberapa tindaklanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Memperbaiki sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan Publik;
- b. Melakukan Pembinaan terhadap staf untuk lebih memahami SOP pelayanan dan memahami/mampu memberikan penjelasan terkait persyaratan pelayanan;
- c. Menyediakan media informasi waktu pelayanan baik banner dan informasi secara online melalui media sosial dan website.

A. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik di seluruh unit pelayanan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari sembilan unsur pelayanan yang dinilai oleh masyarakat. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertimbang (NRR tertimbang) dari seluruh unsur pelayanan adalah 3,35. Setelah dilakukan konversi dengan mengalikan nilai tersebut dengan angka 25, diperoleh nilai akhir IKM sebesar



83,83. Berdasarkan pedoman penilaian Kementerian PANRB, nilai tersebut menempatkan kinerja unit pelayanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kategori “Baik.”

Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Secara umum, hasil ini mencerminkan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar pelayanan yang meliputi kemudahan, kejelasan, ketepatan waktu, keterjangkauan biaya, serta kemampuan dan sikap profesional para pelaksana pelayanan.

Berdasarkan penilaian sembilan unsur pelayanan, diketahui bahwa unsur biaya/tarif (NRR 3,80; NRR tertimbang 0,42) serta pengaduan, saran, dan masukan (NRR 3,75; NRR tertimbang 0,41) memperoleh nilai tertinggi di antara unsur lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap transparansi biaya yang diterapkan pemerintah daerah serta ketersediaan saluran komunikasi untuk menyampaikan pengaduan, saran, dan aspirasi. Kedua unsur ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Sementara itu, unsur dengan nilai relatif lebih rendah seperti waktu penyelesaian (NRR 3,22; NRR tertimbang 0,35) dan sarana dan prasarana (NRR 3,19; NRR tertimbang 0,35) menunjukkan masih adanya ruang perbaikan pada aspek efisiensi pelayanan serta kenyamanan dan kelengkapan fasilitas pelayanan. Walaupun masih dalam kategori “Baik,” nilai ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses layanan serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas yang mendukung aktivitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, capaian nilai IKM sebesar 83,83 ini menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menilai pelayanan publik pemerintah daerah dengan tingkat kepuasan yang tinggi dan positif. Peningkatan yang konsisten dari Tahun-Tahun sebelumnya menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam profesionalisme aparatur, transparansi kebijakan, serta perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.



Namun demikian, hasil ini tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan, melainkan juga bahan refleksi dan evaluasi berkelanjutan untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan terus memperkuat upaya inovasi pelayanan publik, mempercepat waktu penyelesaian, memperbaiki sarana prasarana pendukung, dan mempertahankan unsur-unsur dengan nilai sangat baik seperti biaya/tarif dan pengaduan masyarakat.

Dengan demikian, nilai IKM 83,83 (kategori Baik) ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berhasil mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ke depan, melalui peningkatan kualitas dan inovasi yang berkelanjutan, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mencapai kategori “Sangat Baik” dan menjadi contoh bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang unggul di tingkat daerah.

Tabel 36. IKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,30	0,36
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,29	0,36
U3	Waktu penyelesaian	3,22	0,35
U4	Biaya/tarif	3,80	0,42
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,28	0,36
U6	Kompetensi pelaksana	3,31	0,36
U7	Perilaku pelaksana	3,34	0,37
U8	Sarana dan prasarana	3,19	0,35
U9	Pengaduan, saran dan masukan	3,75	0,41
Nilai Indeks (NI)			3,35
Nilai Indeks setelah konversi (NI x 25)			83,83
Kinrja unit pelayanan			Baik

B. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh 44 perangkat daerah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperoleh perbandingan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari masing-masing perangkat daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 37. Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Unit Pelayanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dan 2025**

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	85,34	Baik	81,79	Baik
2	Sekretariat DPRD	84,6	Baik	82,71	Baik
3	Inspektorat	81,17	Baik	83,69	Baik
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil	82,5	Baik	77,12	Baik
5	Dinas Kesehatan	86,02	Baik	88	Baik
6	Dinas Ketahanan Pangan	80,04	Baik	81,25	Baik
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	79,75	Baik	81,17	Baik
8	Dinas Lingkungan Hidup	78,73	Baik	80,05	Baik
9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	93,69	Sangat Baik	90,08	Sangat Baik
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,98	Baik	86,24	Baik
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	89,32	Sangat Baik	92,79	Sangat Baik
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82,1	Baik	83,06	Baik
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Baik	84,85	Baik
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83,63	Sangat Baik	92,62	Sangat Baik
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89,15	Baik	80,49	Baik
16	Dinas Perkebunan dan Peternakan	80,43	Baik	81,77	Baik
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79,98	Sangat Baik	83,82	Baik
18	Dinas Sosial	93,75	Baik	86,88	Baik
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	83,31	Baik	79,67	Baik
20	Dinas Tenaga Kerja	83,05	Baik	81,24	Baik
21	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	81,88	Baik	82,37	Baik
22	Dinas Perhubungan	81,77	Baik	81,63	Baik
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	83,42	Baik	86,29	Baik
24	Dinas Perikanan	86,8	Baik	87,87	Baik
25	Badan Pendapatan Daerah	82,06	Baik	82,06	Baik
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	86,74	Baik	82,29	Baik
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	81,94	Baik	84,58	Baik
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83,97	Baik	82,53	Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84,58	Baik	87,1	Baik
30	Badan Penanggulangan Bencana	86,38	Baik	83,41	Baik
31	Satuan Polisi Pamong Praja	85,59	Baik	86,88	Baik
32	Kecamatan Batang Asam	79,2	Baik	82,7	Baik
33	Kecamatan Bramitam	81,61	Baik	86,38	Baik
34	Kecamatan Merlung	82,07	Baik	81,02	Baik
35	Kecamatan Tebing Tinggi	86,48	Baik	86,91	Baik



36	Kecamatan Tungkal Ilir	81,57	Baik	82,85	Baik
37	Kecamatan Muara Papalik	82,5	Baik	79,84	Baik
38	Kecamatan Pengabuan	81,58	Baik	84,23	Baik
39	Kecamatan Kuala Betara	83,01	Baik	85,45	Baik
40	Kecamatan Tungkal Ulu	82,82	Baik	80,92	Baik
41	Kecamatan Betara	80,71	Baik	82,56	Baik
42	Kecamatan Renah Mendaluh	76,47	Kurang Baik	80	Baik
43	Kecamatan Seberang Kota	81,53	Baik	80,93	Baik
44	Kecamatan Senyerang	84,81	Baik	82,59	Baik

Berdasarkan tabel perbandingan nilai IKM di atas, di satu sisi, beberapa perangkat daerah berhasil meningkatkan kualitas pelayanannya di Tahun 2025. Di sisi yang lain, beberapa perangkat daerah juga menurun kualitas pelayanannya. Tiga unit pelayanan memiliki kinerja pelayanan “sangat baik”, dan satu unit dengan kinerja pelayanan “kurang baik”. Hasil analisis IKM Tahun 2025 merekomendasi bahwa unit-unit pelayanan yang memiliki skor IKM kecil dari 80 perlu meningkatkan skor IKM mereka melebihi angka tersebut melalui peningkatan kualitas pelayanan di unit masing-masing.

C. REKOMENDASI

Merujuk pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, maka dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Barat, beberapa kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diantaranya:

1. Meskipun secara umum penilaian paling rendah terhadap unsur-unsur pelayanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah “baik”, unsur sarana dan prasarana memperoleh penilaian paling rendah. Karena itu, perlu kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan.
2. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai IKM dengan kinerja pelayanan “Kurang Baik” perlu mendapat penguatan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan kinerja pelayanannya.
3. Masing-masing unsur masih dinilai kurang baik di beberapa perangkat daerah, maka dalam rangka perbaikan semua unsur perlu dilakukan:



- a. Publikasi yang massif terkait setiap unsur SPM pelayanan yang diberikan melalui penyebarluasan informasi diruang publik (melalui media masa, media social maupun papan pengumuman di ruang publik) di masing-masing perangkat daerah;
- b. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan bagi aparatur pelaksana pelayanan masing- masing perangkat daerah;
- c. Penguatan komitmen dari unit pelayanan dan aparatur unit pelayanan masing-masing perangkat daerah untuk melaksanakan SOP yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perjanjian kinerja/fakta integritas; dan
- d. Penguatan pengawasan terhadap unit pelaksana pelayanan dari pimpinan daerah, kepala perangkat daerah, atasan langsung, sesama rekan kerja dan kontrol sosial dari masyarakat luas. Hasil pengawasan ini dapat ditindaklanjuti dengan pemberian reward and punishment terhadap kinerja pegawai dan institusinya.

Tabel 38. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
1	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	Rp. 138.956.000	Rp. 136.033.000	Rp. 2.923.000	2,10%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan didukung oleh program Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana yaitu sebesar **103.81%** dengan efisiensi anggaran **2,10%**. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui kerjasama yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Universitas Islam Negeri Jambi dalam Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SS 6

Meningkatnya kinerja, penganggaran, pengelolaan, keuangan dan aset daerah

Pada sasaran ke 6 (*Enam*) Meningkatkan kinerja, penganggaran, pengelolaan, keuangan dan aset daerah memiliki 1 (*satu*) indikator utama yaitu Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, seperti penjelasan pada tabel dibawah ini :



Tabel 39. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP
Rata-rata Capaian Kinerja										

Sumber : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda Kab. Tanjung Jabung Barat oleh BPK

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu indikator utama keberhasilan upaya tersebut adalah diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia selama enam kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah



dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai, serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mempertahankan opini WTP secara konsisten tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat azas, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Upaya perbaikan terus dilakukan mulai dari tahap perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, pelaksanaan anggaran yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, hingga penatausahaan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan andal. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah juga menjadi perhatian utama guna memastikan pemahaman dan implementasi kebijakan akuntansi serta regulasi keuangan daerah dapat berjalan secara optimal.

Dalam rangka menjaga kualitas laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara konsisten menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, pemutakhiran data dan aset daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam rangka meminimalisasi temuan berulang dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dari Tahun ke Tahun .

Capaian opini WTP enam kali berturut-turut ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, capaian tersebut juga menjadi fondasi penting dalam mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penguatan budaya kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berintegritas, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mendukung

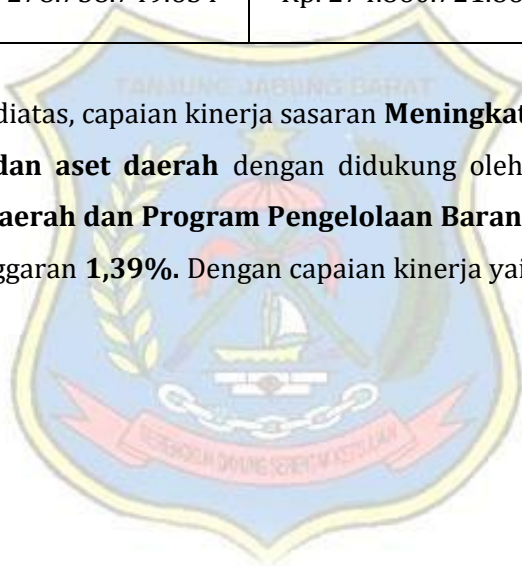


pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 40. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 276.902.360.028	Rp. 273.815.642.488	Rp. 3.086.717.540	1,11
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.856.389.606	Rp. 1.045.079.380	Rp. 811.310.228	43,70
JUMLAH		Rp. 278.758.749.634	Rp. 274.860.721.868	Rp. 3.898.027.766	1,39

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kinerja, penganggaran, pengelolaan, keuangan dan aset daerah** dengan didukung oleh 2 program yaitu **Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** yaitu sebesar **100%** dengan efisiensi anggaran **1,39%**. Dengan capaian kinerja yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)





SS 7

Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan



Dari sasaran Strategis Meningkatkan perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan tersaji dalam tabel berikut ini :

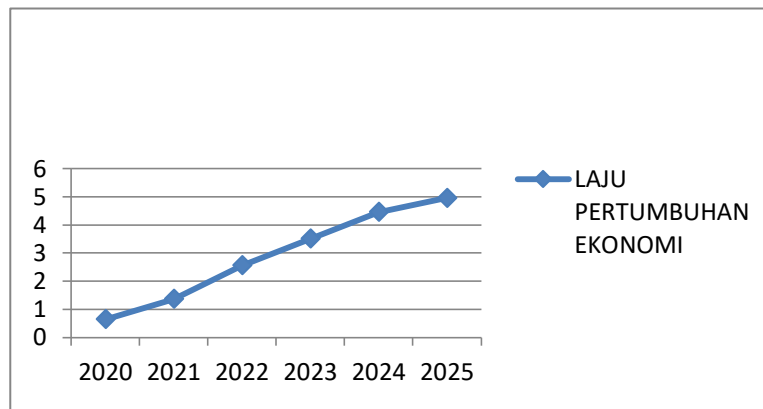
Tabel 41. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Laju pertumbuhan ekonomi	0,64%	1,36%	2,56%	3,51%	4,45%	4.59%	5,28 %	115,03	4,00%
Rata-rata Capaian Kinerja										

Sumber : PDRB Tanjung Jabung Barat 2020-2024, BPS Kab. Tanjung Barat

Tabel 42. Perbandingan Laju Pertumbuhan Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dan Nasional

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanjung Jabung Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
5,28	4,93	5,04

**Grafik 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi atau Economic Growth bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output suatu wilayah dengan pengukuran tertentu. Biasanya, teknik pengukuran yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Para ahli memberikan definisi yang bervariasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Misalnya, menurut Prof. Simon Kuznets pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang keperluan ekonomi untuk penduduknya. Sedangkan, Harrod-Domar menjelaskan bahwa konsep pertumbuhan ekonomi modern saat ini sangat berkaitan dengan pembentukan investasi. Semakin tinggi investasi yang terjadi di suatu wilayah maka akan semakin baik perekonomian yang terjadi di wilayah tersebut. Konsep lainnya yaitu mengharuskan input agar menghasilkan output yang lebih banyak. Konsep ini yang menjadi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara umum. Pembangunan ekonomi harus disertai dengan penggantian kelembagaan dalam menghasilkan output.





Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan dalam perubahan output nasional. Dalam praktiknya, perubahan output dalam pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai bahan analisis ekonomi jangka pendek suatu negara. Jadi, bahan analisa ekonomi ini akan sangat penting untuk menggagas prinsip ekonomi satu negara.

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi, indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi pada daerah yang bersangkutan, khususnya dengan



menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat dua jenis PDB/ PDRB yaitu : a) PDB/PDRB atas dasar harga berlaku, yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa

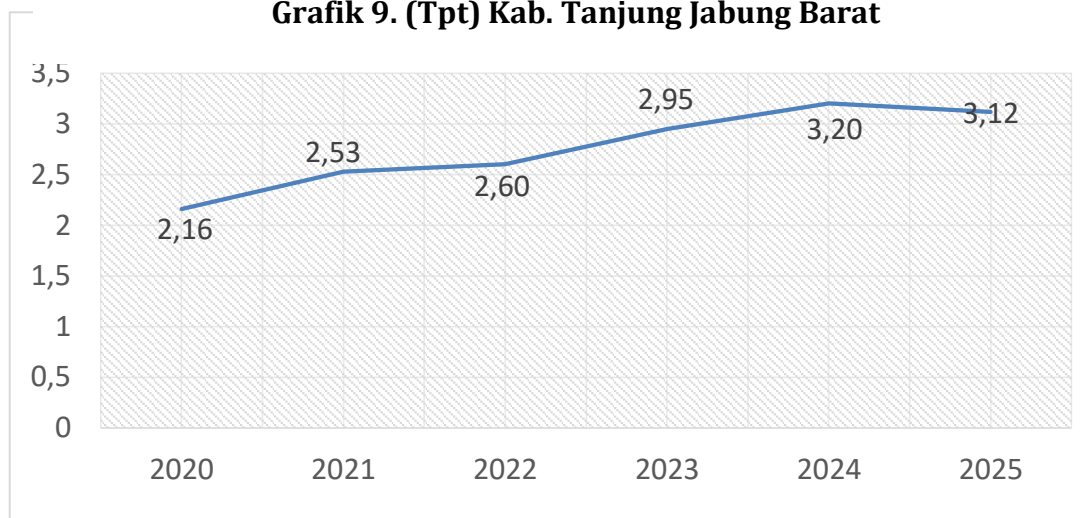
yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap Tahun . PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi; dan b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun sebagai dasar. PDRB ADHK dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari Tahun keTahun .

Kapasitas perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mengalami pertumbuhan ke arah positif. Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami pertumbuhan pada Tahun 2025 dengan tingkat pertumbuham 5.28% meningkat bila dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 0,83%. Pertumbu ekonomi Kab. Tanjung Jabung Barat Juga lebih tinggi dari pada Perumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi sebesar 4,93 dan



Pertumbuhan ekonomi Indonesia Sebesar 5.04%

Grafik 9. (Tpt) Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber : BPS Tanjung Jabung Barat Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Agustus 2025/Bappeda Tanjung Jabung Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,28 persen, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama Tahun 2024 yang sebesar 4,45 persen. Peningkatan ini mencerminkan mulai pulih dan menguatnya aktivitas ekonomi daerah, seiring dengan meningkatnya kinerja sektor-sektor utama serta membaiknya daya beli masyarakat.

HAMBATAN DAN SOLUSI

A. HAMBATAN

Adapun hambatan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

- 1) Distribusi hasil produksi dan akses pasar masih dipengaruhi oleh kondisi jalan antar kecamatan, ditambah dengan masih sangat terbatasnya dermaga atau pelabuhan. Jalan dan dermaga/pelabuhan adalah infrastruktur strategis yang berperan sebagai urat nadi perekonomian daerah, karena menjadi penghubung utama antara sentra produksi dengan pusat perdagangan, distribusi, dan konsumsi. Keterbatasan kualitas dan kapasitas infrastruktur tersebut berdampak pada tingginya



biaya logistik, lambatnya arus barang dan jasa, serta menurunnya daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.

- 2) Wilayah bagian pesisir dan sungai Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti Kec. Kuala Betara, Kecamatan Seberang Kota dan termasuk juga Ibu Kota Kuala Tungkal, keberadaan dermaga dan pelabuhan yang memadai menjadi semakin krusial untuk mendukung mobilitas komoditas unggulan seperti perkebunan, perikanan, dan hasil pertanian. Apabila konektivitas darat dan laut belum optimal, maka potensi ekonomi yang besar tidak dapat dikonver Hilirisasi dan Industri Pengolahan Belum Optimal
- 3) Pertumbuhan belum sepenuhnya ditopang sektor sekunder (industri pengolahan) dan masih sangat tergantung dengan sektor primer (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (khususnya perkebunan kelapa sawit dan perikanan tangkap/budidaya), dan sektor Pertambangan dan penggalian (migas dan komoditas lainnya.. Akibatnya Kebocoran nilai tambah ke luar daerah dan PDRB tinggi tetapi pendapatan masyarakat belum merata.

SOLUSI

Adapun solusi untuk hambatan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Prioritas Peningkatan Jalan Penghubung Sentra Produksi dan Dermaga/pelabuhan bongkar muat barang dan orang.

Terdapat beberapa ruas jalan poros penghubung antar kecamatan – Ibu Kota Kuala Tungkal yang masih belum tuntas yaitu ruas jalan dari kec. Batang Asam menuju Kel.Tungkal V Kota Kec. Seberang Kota, dan ruas jalan Kec. Senyerang menuju Desa Lumahan Kec. Senyerang, disamping itu perlu penambahan dan peningkatan kapasitas dermaga yang ada di sepanjang pesisir pantai.Dengan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi (pengurangan TKDD) oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan seperti Skema multiyears contract untuk ruas prioritas, dan Sinergi pembiayaan APBD, APBN, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).



2) Mendorong Hilirisasi di Dekat Sentra Produksi

Cara yang terbaik agar terjadinya hilirisasi adalah dengan membangun industri pengolahan skala kecil-menengah di dekat sumber bahan baku. Pemerintah daerah sudah berupaya dengan memberikan kemudahan berinvestasi dan insentif bagi investor yang ingin berinvestasi di wilayah kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel 43. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana pertanian	Rp. 11.233.269.942	Rp. 9.887.426.517	Rp. 1.345.843.425	11,98
2	Program pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan mikro	Rp. 1.140.971.200	Rp. 1.011.141.994	Rp. 129.829.206	11,37
3	Program pengembangan iklim penanaman modal	Rp. 2.219.000	Rp. 1.244.000	Rp. 975.000	43,93
JUMLAH		Rp. 12.376.460.142	Rp. 10.899.812.511	Rp. 1.476.647.631	11,93

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan** dengan didukung oleh 3 program yaitu program **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana pertanian**, Program **Pemberdayaan Usaha menengah usaha kecil dan mikro** dan Program **Pengembangan iklim penanaman modal** yaitu sebesar 108,06% dengan efisiensi anggaran 11.93 %.



SS 8

Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup



Dari sasaran Strategis Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 44. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,22	68,25	69.61	72.69	77.36	80,06	71,69	89,54%	70,00
Rata-rata Capaian Kinerja										

Sumber :Aplikasi IKLH kementerian Lingkungan Hidup

Tabel 45. Perbandingan IKLH Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2025

IKLH Kab. Tanjung Jabung Barat	IKLH Provinsi Jambi	IKLH Nasional
71,69	73,97	73.55

IKLH Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Enviromental Performance Index (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Yale University. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam



mendukung proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada suatu wilayah. IKLH nasional merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia sedangkan IKLH Kabupaten akan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup dari Kabupaten tersebut. Dalam perkembangan perhitungan, IKLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2024 merupakan penghitungan dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.

Pada Tahun 2025 Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan nilai 71,69 dan Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun pelaporan menunjukkan sebesar 98,74% dari target yang ditetapkan, sehingga belum mencapai target kinerja secara optimal.

Capaian realisasi yang belum mencapai target secara optimal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya perubahan metodologi perhitungan IKLH dari salah satu komponen penyusunan IKLH, seperti kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan. Nilai IKU pada Raport 2025 mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya dikarenakan perubahan dalam metode perhitungan yang digunakan. Pada Tahun 2025 terdapat penambahan parameter PM 2.5 yang sebelumnya tidak ada, sehingga mempengaruhi pembobotan pada indeks pencemaran. Sebelumnya parameter yang digunakan hanya SO₂ dan NO₂ dengan bobot indeks pencemaran SO₂ = 20 µg/m³ dan NO₂ = 40 µg/m³ sedangkan Tahun ini untuk SO₂ = 45 µg/m³, NO₂ = 50 µg/m³ dan PM_{2,5} = 15 µg/m³. (PP Nomor 22 Tahun 2021).

Namun dalam Rapor IKL terdapat kenaikan nilai yang cukup besar. Sebelumnya nilai raport IKL Tahun 2024 diangka 55,98 sedangkan Tahun ini nilai IKL diangka 72,34, Hal ini juga dikarenakan penambahan variabel dan koefisien dan semua angkanya didapatkan berdasarkan citra satelit dan di input langsung oleh KLHK.

Untuk capaian Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan mengalami penurunan



dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD, yang menunjukkan adanya tantangan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meskipun demikian, capaian sebesar 98,74% menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup telah berjalan dengan baik. Namun masih memerlukan penguatan strategi dan inventarisasi yang lebih terarah serta peningkatan efektivitas program pengendalian pencemaran dan penguatan kolaborasi lintas sektor agar nilai IKLH dapat kembali meningkat.

a. Faktor penghambat dan solusi

1. Perubahan Metodologi Perhitungan IKLH

Adanya perubahan metode perhitungan IKLH, khususnya penambahan parameter PM_{2,5} serta perubahan bobot pencemar udara sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021, menyebabkan nilai indeks mengalami penyesuaian. Kondisi ini menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja karena standar penilaian menjadi lebih ketat dibandingkan periode sebelumnya.

Solusi : Penyesuaian Target dan Strategi terhadap Metodologi Baru, Melakukan penyesuaian target kinerja IKLH serta strategi pencapaiannya agar selaras dengan metode penghitungan terbaru, termasuk memasukkan parameter PM_{2,5} sebagai fokus utama pengendalian pencemaran udara.

2. Keterbatasan Kendali Daerah terhadap Data IKL

Data Rapor IKL yang bersumber dari citra satelit dan dihitung serta diinput langsung oleh KLHK membatasi peran pemerintah daerah dalam melakukan intervensi teknis secara langsung terhadap proses penilaian, sehingga daerah lebih bersifat sebagai penerima hasil.

Solusi : Penguatan Program Pengendalian Pencemaran yang Lebih Terarah, mengoptimalkan program pengendalian pencemaran udara, air dan lahan secara terfokus pada sumber pencemar utama, melalui peningkatan pengawasan, penegakan aturan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

3. Belum Optimalnya Program Pengendalian Pencemaran

Pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara, air dan lahan belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai indeks, khususnya pada indikator yang sensitif terhadap perubahan



metodologi.

Solusi : Peningkatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Lingkungan, Melakukan inventarisasi lingkungan hidup secara berkala dan terintegrasi, termasuk pemanfaatan data spasial dan pemantauan kualitas lingkungan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

4. Keterbatasan Inventarisasi dan Data Lingkungan Hidup Daerah

Inventarisasi lingkungan hidup daerah belum sepenuhnya terintegrasi dan diperbarui secara berkala, sehingga belum dapat secara optimal mendukung penyusunan kebijakan dan program berbasis data yang akurat.

Solusi : Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor, meningkatkan sinergi antara perangkat daerah, KLHK, dunia usaha, dan masyarakat melalui forum koordinasi, program kolaboratif, dan perjanjian kerja sama dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup

5. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup memerlukan keterlibatan lintas sektor, namun koordinasi antar perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat masih perlu diperkuat agar program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Solusi : Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait pengelolaan kualitas lingkungan dan pemahaman metodologi IKLH terbaru, guna mendukung implementasi program yang lebih efektif.

Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut dan menerapkan solusi yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara signifikan

Tabel 46. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	137.720.000	133.095.000	4.625.000	3%



KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	119.240.000	115.095.000	4.145.000	4%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	18.480.000	18.000.000	480.000	3%
	137.720.000	133.095.00	4.625.000	3%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup Untuk mendapatkan capaian kinerja tersebut indikator indek gini didukung program kinerja yaitu **PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** yaitu sebesar 89,54% dengan efisiensi anggaran 3%



SS 9

Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota



Sasaran Strategis 9 (sembilan) yaitu Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota dalam tabel berikut ini :

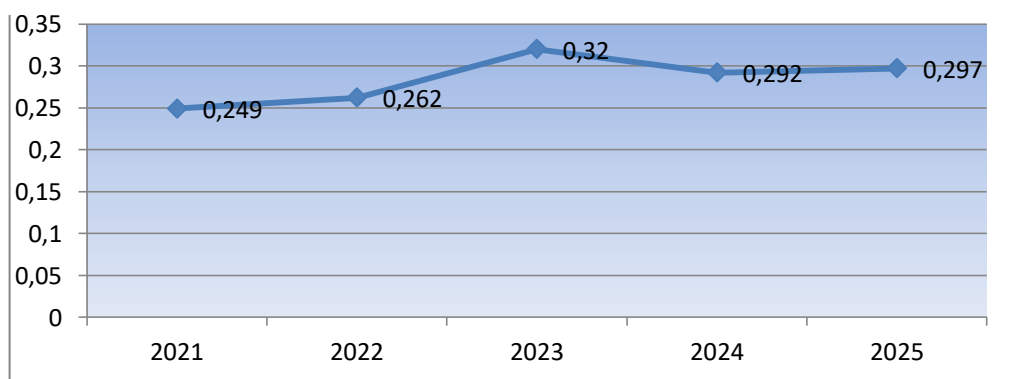
Tabel 47. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Indeks Gini Dan Indeks Infrastruktur

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Gini*	0,281	0,249	0,262	0,32	0,292	0,287	0,297	96,63%	0,250
2	Indeks Infrastruktur**	62,15	62,15	70,56	45	81,65	83,448	78,97	94,63%	73,19
Rata-rata Capaian Kinerja										

Sumber : *Gini rasio Kab. Tanjung Jabung Barat 2025, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, **hasil Perhitungan data kompilasi BAPPERIDA Kab. Tanjab Barat

A. INDEKS GINI

Grafik 10. Indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025





Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merencanakan pencapaian pembangunan inklusif yaitu pembangunan dengan pemerataan dan manfaat



pembangunan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan pendapatan dan kecilnya kesenjangan tingkat pendapatan. Pengukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat

ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah, salah satunya adalah Indeks Gini atau Rasio Gini (Gini Ratio).

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada tingkatan Moderat. Ketimpangan pendapatan lebih disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, wilayah, dan sosial yang belum merata, di beberapa wilayah (kecamatan/desa) masih tertinggal dari wilayah (kecamatan/desa) lain dari sisi ketersediaan infrastruktur dasar. Kesempatan/peluang daerah untuk berkembang yang kecil akan menurunkan



kemampuan masyarakatnya dalam memperoleh pemasukan/pendapatan.



Selain itu terjadinya tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Angka Gini Ratio pada Tahun 2023 tercatat sebesar 0,320 kemudian turun tercatat sebesar 0,290 pada Tahun 2024 dan kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2025 sebesar 0,297.

Nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada tingkatan Moderat. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengatasi tingkat kesenjangan.

B. INDEKS INFRASTRUKTUR

Indeks Infrastruktur merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung umumnya disusun dari beberapa komponen utama yang mencerminkan kondisi layanan infrastruktur dasar di suatu wilayah, yaitu jalan mantap, desa blankspot, rasio elektrifikasi, akses air bersih, dan akses sanitasi. Pada Tahun 2025 indeks infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 78,97 persen

Pada Tahun 2025 kondisi jalan mantap Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 31,5 persen, mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya (32,06 persen). Penurunan persentase jalan mantap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang memengaruhi kualitas dan keberlanjutan kondisi infrastruktur jalan. Secara umum, kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut : Terbatasnya alokasi anggaran pemeliharaan dan peningkatan jalan, Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat beban kendaraan, dan Faktor kondisi



geografis dan lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki karakteristik wilayah dengan kondisi tanah yang relatif lunak.

Penurunan persentase jalan mantap perlu direspon melalui berbagai upaya strategis yang berfokus pada Prioritas peningkatan jalan pada ruas

strategis, dan Peningkatan kualitas konstruksi jalan. Prioritas peningkatan jalan pada ruas strategis

Penanganan peningkatan kualitas jalan perlu diprioritaskan pada ruas jalan yang memiliki fungsi strategis, seperti jalan penghubung antar kecamatan, akses menuju pusat ekonomi, kawasan produksi perkebunan, serta jalur distribusi barang dan jasa. Penguatan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berlebih, dan solusi utama yang perlu dilaksanakan adalah peningkatan kualitas konstruksi jalan. Dalam pembangunan dan peningkatan jalan, perlu diterapkan standar teknis yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah, termasuk penggunaan material yang lebih kuat serta peningkatan kualitas struktur jalan agar lebih tahan terhadap kondisi tanah dan curah hujan.

Pada Tahun 2025 masih terdapat 2 desa blankspot di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari total 114 desa, yaitu Desa Sei Jering Kecamatan Senyerang dan Desa Sungai Paur Kecamatan Renah Mendaluh yang belum terjangkau layanan telekomunikasi dan internet. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan akses terhadap infrastruktur digital di wilayah tersebut. Beberapa permasalahan yang menyebabkan kedua desa tersebut masih berada dalam kondisi blankspot antara lain: Kondisi geografis dan keterpencilan wilayah, Pertimbangan keekonomian bagi operator telekomunikasi, dan Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan sarana transportasi.

Untuk mengatasi masih adanya **2 desa blankspot di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**, yaitu **Desa Sei Jering Kecamatan Senyerang** dan **Desa Sungai Paur Kecamatan Renah Mendaluh**, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya strategis guna



memperluas akses telekomunikasi dan internet bagi masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Mendorong pembangunan BTS melalui program pemerintah pusat
- Meningkatkan kerja sama dengan operator telekomunikasi, dan
- Penguatan infrastruktur pendukung

Pada Tahun 2025 rasio elektrifikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 96 persen, meningkat sebesar 1 persen dari Tahun 2024 (95 persen). Rasio elektrifikasi menggambarkan tingkat pemerataan akses energi listrik bagi masyarakat. Akses listrik yang memadai sangat penting dalam mendukung aktivitas rumah tangga, kegiatan ekonomi, pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum. Terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi rasio elektrifikasi antara lain : Sebaran permukiman yang terpencar dan sulit dijangkau, keterbatasan jaringan distribusi listrik dan ketersediaan infrastruktur pendukung



Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada Tahun 2025 mencapai 96 persen, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai langkah strategis guna memperluas pemerataan akses listrik, terutama pada wilayah yang masih belum

terlayani secara optimal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Perluasan jaringan listrik oleh PLN
- Pengembangan energi alternatif atau energi terbarukan, dan
- Integrasi pembangunan listrik dengan pengembangan infrastruktur dasar

Pada Tahun 2025 , persentase akses air bersih masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 89,87 persen, tidak mengalami perubahan dari Tahun 2024. Komponen keempat adalah akses air bersih, yang menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak dan aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari . Terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi penyediaan akses air antara lain Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem air bersih dan



Kondisi geografis dan sebaran permukiman

Untuk meningkatkan persentase akses air bersih masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang pada Tahun 2025 tercatat sebesar 89,87 persen dan belum mengalami peningkatan dibandingkan Tahun sebelumnya, diperlukan berbagai upaya strategis guna memperluas cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat, terutama di wilayah yang belum terlayani secara optimal.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Optimalisasi sumber pendanaan pembangunan air bersih
- Pemanfaatan teknologi penyediaan air bersih yang sesuai dengan kondisi wilayah

Pada Tahun 2025 akses sanitasi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 77,25 persen juga tidak mengalami perubahan dari Tahun sebelumnya. Akses sanitasi adalah persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak, seperti jamban sehat dan sistem pembuangan limbah domestik yang memenuhi standar kesehatan. Akses sanitasi yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit berbasis lingkungan, serta perbaikan kualitas lingkungan permukiman. Terdapat beberapa permasalahan akses masyarakat terhadap sanitasi diantaranya : rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi, Kondisi geografis wilayah tertentu, Keterbatasan infrastruktur sanitasi permukiman akibat keterbatasan anggaran.

Untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang pada Tahun 2025 tercatat sebesar 77,25 persen dan belum mengalami peningkatan dibandingkan Tahun sebelumnya, diperlukan berbagai upaya yang terintegrasi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan dukungan pendanaan pembangunan sanitasi.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan pembangunan sarana sanitasi layak
- Penguatan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)

Peningkatan edukasi dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat

1) Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah

**domestik.**

Target kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air limbah pada Tahun 2022 adalah 69% dan realisasi 65,02%, Atau sebanyak 64.234 Rumah tangga telah memiliki akses terhadap pelayanan air limbah yang aman dari 98.798 jumlah total rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022.

Adapun Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 94,23%. Capaian ini dikategorikan Baik, karena telah hampir mendekati target yang telah ditetapkan, target ini dapat di capai karena adanya bantuan pendanaan dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun 2021. Indikator ini juga merupakan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di amanatkan oleh pemerintah pusat ke pada pemerintah daerah melalui dinas PUPR. realisasi target ini bisa di katakan menurun bila di bandingkan pada Tahun 2021 sebesar 119,38 %, secara teknis jumlah penerima bantuan pengelolaan air limbah meningkat namun yang menjadi pembanding menurunnya realisasi target ini adalah adanya perbedaan bilangan pembagi yaitu jumlah rumah tangga yang terkonfirmasi (data dukcapil 2022) 98.798 RT yang jauh meningkat dari jumlah RT pada 2022 sebanyak 83.654 RT.

Tahun 2023, realisasi sebesar 76,40%. Dibanding Tahun 2022, pengolahan air limbah mengalami kenaikan capaian sebesar 17,5%. Di Tahun 2024 tidak ada realisasi, karena untuk kegiatan pengolahan air limbah tidak teranggarkan. Seperti di Tahun sebelumnya, pada Tahun 2025, tidak ada realisasi, karena untuk kegiatan pengolahan air limbah tidak teranggarkan.

2) Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari".

Target kinerja persentase rumah tangga terlayani air minum di wilayah kabupaten pada Tahun 2022 adalah 75% dengan realisasi 73,65 % sehingga capaian nya adalah sebesar 98,20% Atau terdapat 72.770 rumah tangga yang telah terlayani akses air minum baik dari pelayanan yang berbasis perpipaan atau pun yang non perpipaan dari 98.798 jumlah total rumah tangga di kabupaten Capaian ini dikategorikan baik, dikarenakan hampir mendekati target yang di rencanakan, tidak ada permasalahan yang bersifat teknis untuk pencapaian target ini, pemenuhan



indikator ini sudah sesuai dengan perencanaan di Renstra mau pun RPJMD kabupaten, walaupun terjadi penurunan di besaran capaiannya yang terjadi karena perbandingan bilangan pembagi yaitu jumlah rumah tangga kabupaten yang terkonfirmasi (data dukcapil 2022) 98.798 RT yang jauh meningkat dari jumlah RT pada 2022 sebanyak 83.654 RT. Indikator Kinerja Utama Ini juga merupakan target SPM yang di amanatkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjab Barat. Tahun 2023 realisasi meningkat menjadi 87,68%, tetapi Tahun 2024 realisasi menurun, hal ini dikarenakan dana yang dianggarkan hanya untuk penggantian pipa jaringan distribusi. Tahun 2025 realisasi kinerja menurun menjadi 29%, hal ini dikarenakan adanya perubahan target sesuai RPJMD 2025 - 2029.

HAMBATAN DAN SOLUSI

A. Hambatan

Adapun hambatan dalam meningkatkan indeks gini dan indeks infrastruktur adalah sebagai berikut:

- Belum tersedianya IPLT Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Kurangnya anggaran untuk mengintervensi program/kegiatan ini.

B. Solusi

- Menyediakan IPLT dan fasilitas pendukungnya
- Menyediakan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan ini.

Tabel 48. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Gini Dan Indeks Infrastruktur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
Indeks Gini dan Indeks infrastruktur					
1	Program Penyelenggaraan jalan	Rp. 249.702.876.035	Rp. 248.136.144.279,71	Rp. 1.566.731.756.29	0,63
JUMLAH		Rp. 249.702.876.035	Rp. 248.136.144.279,71	Rp. 1.566.731.756.29	0,63



Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota yang memiliki 2 indikator kinerja utama yaitu indeks gini 96,63% dan indeks infrastruktur 94,63 %. Untuk mendapatkan capaian kinerja tersebut indikator indeks gini didukung oleh program kinerja yaitu **Program Penyelenggaraan jalan**, dengan efisiensi anggaran sebesar 0.63%

3.3. REALISASI ANGGARAN

Capaian kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dari jumlah serapan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan Tahun an pemerintah daerah dalam 1 (satu) Tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk



mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan, namun dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrument dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan



Daerah maupun Keputusan Kepala daerah.

2. Realisasi Belanja

Untuk belanja daerah, alokasi dana yang dianggarkan pada Tahun APBD 2025 adalah dengan adanya pengurangan penerimaan, maka komposisi anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD Perubahan menjadi 2.079.006.162.757,00- dengan komposisi Belanja Daerah 2.070.737.593.260,20- atas pagu anggaran APBD Perubahan tergambar dalam tabel:

Tabel 49. Jumlah Dan Realisasi Belanja APBD (Perubahan) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

(DATA SEMENTARA NON AUDIT KEADAAN AKHIR DESEMBER 2025)

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2025	SISA ANGGARAN	%
BELANJA DAERAH	2.181.186.146.084,00	2.080.548.830.714,61	100.637.315.369,39	95,38
BELANJA OPERASI	1.222.921.903.912,00	1.134.061.344.862,71	88.860.559.049,29	92,73
Belanja Pegawai	645.943.842.242,00	603.234.674.353,37	42.709.167.888,63	93,38
Belanja Subsidi	4.266.121.000,00	4.266.121.000,00	-	100
Belanja Barang dan Jasa	516.642.389.625,00	471.223.657.176,35	45.418.732.448,65	91,20
Belanja Modal	682.868.790.344,00	674.012.355.663,90	8.856.434.680,1	98,70
Belanja Hibah	46.769.551.045,00	46.256.892.332,99	512.658.712,01	98,90
Belanja Bantuan Sosial	9.300.000.000,00	9.080.000.000,00	220.000.000,00	97,63
Belanja Bagi Hasil	5.037.552.628,00	5.037.552.628,00	-	100
Belanja Bantuan Keuangan	268.357.899.200,00	267.418.043.960,00	939.855.240	99,64
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	19.533.600,00	1.980.466.400	0,97

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah



Tabel 50. Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Rp. 187.824.410.002	Rp. 172.535.941.659	91,87
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman	5.233.745.200	5.068.099.379	96,73
3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Rp. 1.277.509.200	Rp. 362.952.750	28,42
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	<i>Nilai SAKIP Kabupaten</i>	Rp. 1.277.509.200	Rp. 362.952.750	28,42
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Rp. 138.956.000	Rp. 136.033.000	97,90
6.	Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	<i>Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan</i>	Rp. 278.758.749.634	Rp. 274.860.721.868	98,61
7.	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	<i>Laju pertumbuhan Ekonomi</i>	Rp. 12.376.460.142	Rp. 10.899.812.511	88,07
8.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	Rp. 137.720.000	Rp. 133.095.00	97,00
9.	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	<i>Indeks gini</i>	Rp. 249.702.876.035	Rp. 248.136.144.279,71	99,37
		<i>Indeks Infrastruktur</i>	Rp. 249.702.876.035	Rp. 248.136.144.279,71	99,37



Tabel 51. Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Kinerja (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	98,09	100,30	efisien
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman	96,73	102,05	efisien
3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	28,42	105,65	efisien
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	28,42	93,62	efisien
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,90	103,81	efisien
5.	Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan	98,61	100	efisien
6	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan Ekonomi	88,07	108,06	efisien
7.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	97,00	89,54	efisien
8.	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	Indeks gini	99,37	96,63	efisien
		Indeks Infrastruktur	99,37	94,63	efisien

3. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Bila realisasi anggaran dibandingkan dengan kinerja yang dicapai Tahun 2025, dimana rata-rata realisasi anggaran sebesar 93.87% dan realisasi dari capaian kinerja dari 10 indikator kinerja utama sebesar 108.76% maka **terlihat adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran pada program-program yang mendukung capaian kinerja Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025.**

**BAB IV****KATA PENUTUP**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, secara umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran - sasaran strategisnya. Sasaran yang berjumlah 9

(Sembilan) sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, semua sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan Sangat Berhasil dan Berhasil dengan capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 108.79%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, dan untuk memberikan gambaran tentang kinerja pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2025, menjabarkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, serta mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada *Stakeholder*.

Berdasarkan hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten



Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 direkomendasikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Memastikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi telah menyajikan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil serta menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan.
2. Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
3. Mereviu kembali penetapan target setiap PD dengan memastikan seluruh target kinerja dapat dicapai, menantang, dan realistis. Selain itu memastikan juga penetapan target pada PD dapat mendukung pencapaian target level Pemda;
4. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
5. Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
6. Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.
7. Menyampaikan IKU yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah terbaru dan dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi penghitungan yang relevan untuk setiap indikator kinerja melalui esr.menpan.go.id;



8. Memaksimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja untuk melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan) dan untuk menyampaikan kinerja PD sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran dan transparansi kepada publik;
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
10. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.
11. Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dan menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja Tahun -Tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
12. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja Tahun berikutnya;
13. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
14. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah



Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

15. Menyusun kebijakan reward dan punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Tindaklanjut dan perubahan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peningkatan capaian kinerja terhadap hasil evaluasi pelaporan kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan reviu menyeluruh terhadap RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD oleh APIP dan Bapperida Termasuk dalam reviu menyeluruh terhadap RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD oleh APIP dan Bapperida;
2. Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target Tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya;
3. Bagian Organisasi telah Melakukan Upgrade untuk Menyempurnakan Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung pada Tahun 2025
4. Bagian Organisasi dalam melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah mengacu pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 untuk menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target Tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja



5. Bagian Organisasi melaksanakan desk terhadap Perangkat daerah dalam rangka menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Laporan Kinerja KemenPANRB
6. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah pada Tahun sebelumnya telah dijadikan salah satu instrument untuk menentukan besar atau kecilnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja di Perangkat Daerah 2. Pemanfaatan aplikasi SIMEKA sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja yang menjadi aspek penentu dalam memberikan Reward and Punishment. 3. Tersedianya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil 4. Tersedianya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara 5. Pemanfaatan aplikasi integrated Mutasi (I-Mut) dalam proses Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Kenaikan Jenjang Jabatan, Pengembangan Kompetensi dan Mutasi sesuai Regulasi dari BKN. 6. Pemanfaatan e-Kinerja dalam penentuan Target Kinerja kedepa
7. Melakukan penyempurnaan instrumen dan metodologi evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih terukur dan berbasis indikator kinerja yang relevan. 2. Melaksanakan reuiu internal atas hasil evaluasi untuk memastikan kesesuaian antara penilaian dan kondisi riil unit kerja. 3. Memasukkan target capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah ke dalam Sasaran Kinerja tidak hanya pada Inspektur, tetapi juga kepada seluruh Inspektur Pembantu (Irban) sesuai wilayah binaannya dst. 4. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
8. Menyusun daftar monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh Perangkat Daerah. 2.



- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulanan/semesteran) terhadap progres tindak lanjut. 3. Menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4. Memberikan teguran atau rekomendasi percepatan kepada PD yang belum menindaklanjuti hasil evaluasi.
9. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang memberikan tambahan besaran TPP bagi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP kategori A dan BB berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat. 2. Pada akhir Desember 2025, telah dilaksanakan pemberian reward kepada Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP terbaik versi Inspektorat, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan akuntabilitas kinerja. 3. Menambahkan indikator persentase capaian tindak lanjut (TL) atas hasil pemeriksaan sebagai salah satu komponen pertimbangan dalam pemberian reward, sehingga tidak hanya berbasis nilai SAKIP, tetapi juga pada tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi pengawasan. 4. Melakukan publikasi atas Perangkat Daerah berprestasi sebagai bentuk transparansi dan pembelajaran bersama. 5. Menetapkan mekanisme pembinaan khusus bagi Perangkat Daerah dengan nilai rendah dan/atau persentase tindak lanjut yang belum optimal.

Akhirnya secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dipenuhi dengan capaian 10 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: Indeks Pembangunan manusia 100,30%, Indeks Ketentraman 102,05%, Indeks Reformasi Birokrasi 105,65%, Nilai SAKIP Kabupaten 93,62%, Indeks Kepuasan Masyarakat 103,81%, Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 100%, Laju Pertumbuhan Ekonomi 108,06%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



89,54%, Indeks gini 96,63% dan Indeks Infrastruktur 94,63%.





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal Provinsi Jambi Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238

Pos-el: itkabtb@gmail.com Laman: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, Tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kuala Tungkal, 17 Maret 2026

PIh. Inspektur Daerah,




Drs. H. Muhammad Yunus

Pembina Utama Muda

NIP. 19680417 198810 1 001



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Jabatan : BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kuala Tungkal, 2 Januari 2026
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,27
2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Kemiskinan	7,55 – 8,88
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,783 – 3,075
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Prevalensi Stunting	6,32
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Indeks Kesejahteraan Sosial	55,51 – 56,00
5	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	72,50
7	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,40
8	Meningkatnya Kesenjangan Akses Infrastruktur dan Keuangan	Indeks Infrastruktur	82,10
9	Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,27
10	Meningkatnya Upaya Eksensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1,50

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2026
1	Program Pengelolaan Pendidikan	RP. 68.010.585.000,00
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	RP. 37.066.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP. 329.882.861.785,00
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RP. 73.974.395.773,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RP. 1.938.865.000,00
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RP. 517.366.000,00
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RP. 42.130.000
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP. 203.536.471.048,00
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	RP. 1.103.580.000,00
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RP. 1.650.775.000,00
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RP. 350.000.000,00
12	Program Penataan Bangunan Gedung	RP. 854.120.000,00
13	Program Penyelenggaraan Jalan	RP. 20.493.140.489,00
14	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	RP. 400.000.000,00
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP. 8.107.938.004,00
16	Program Pengembangan Perumahan	RP. 167.900.000,00
17	Program Kawasan Permukiman	RP. 1.157.700.000,00
18	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	RP. 1.875.100.000,00
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	RP. 3.801.123.060,00
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP. 19.460.519.313,00

21	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	RP.	137.403.200,00
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	10.048.752.757,00
23	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RP.	413.018.000,00
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	7.912.650.414,00
25	Program Penanggulangan Bencana	RP.	218.399.800,00
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	4.467.299.243,00
27	Program Rehabilitasi Sosial	RP.	833.189.824,00
28	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RP.	280.061.200,00
29	Program Penanganan Bencana	RP.	110.657.800,00
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	3.663.371.820,00
31	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	RP.	140.604.100,00
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.849.900.439,00
33	Program Hubungan Industrial	RP.	818.701.000,00
34	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RP.	365.470.000,00
35	Program Perlindungan Perempuan	RP.	256.350.000,00
36	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	RP.	63.340.000,00
37	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	223.263.000,00
38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	5.409.275.144,00
39	Program Pengendalian Penduduk	RP.	150.465.000,00
40	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	RP.	709.408.000,00
41	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		1.508.400.000,00
42	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RP.	186.363.000,00
43	Program Pengawasan Keamanan Pangan	RP.	101.255.000,00
44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	3.426.213.732,00
45	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RP.	1.000.000,00
46	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RP.	13.000.000,00
47	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	RP.	877.790.000,00
48	Program Pengelolaan Persampahan	RP.	5.924.285.000,00
49	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	9.209.515.557,00
50	Program Administrasi Pemerintahan Desa	RP.	2.058.271.800,00
51	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RP.	626.240.000,00
52	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	4.569.022.867,00
53	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llj)	RP.	192.505.000,00
54	Program Pengelolaan Pelayaran	RP.	2.301.270.000,00
55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	7.596.815.302,00
56	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	RP.	2.085.917.000,00
57	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	RP.	1.798.636.000,00
58	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	4.905.374.698,00
59	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RP.	1.500.000,00
60	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	RP.	50.000.000,00
61	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	RP.	15.436.000,00
62	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	RP.	51.990.000,00
63	Program Pengembangan Umkm	RP.	1.845.000,00
64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	4.627.873.912
65	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RP.	173.400.000,00
66	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RP.	202.986.000,00
67	Program Pengembangan Ekspor	RP.	2.350.000,00
68	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RP.	4.700.000,00
69	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RP.	208.820.000,00
70	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	RP.	2.205.000,00
71	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RP.	4.410.800,00
72	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RP.	12.059.600,00
73	Program Promosi Penanaman Modal	RP.	1.500.000,00
74	Program Pelayanan Penanaman Modal	RP.	37.468.000,00
75	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RP.	16.023.000,00
76	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RP.	9.245.000,00
77	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	5.092.560.444,00
78	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RP.	141.515.000,00
79	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RP.	693.810.700,00
80	Program Pengembangan Kapasitas Keparmukaan	RP.	340.600.000,00
81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	4.354.822.494,00
82	Program Pengembangan Kebudayaan	RP.	236.390.000,00
83	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RP.	722.395.000,00
84	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	RP.	150.000.000,00
85	Program Pembinaan Perpustakaan	RP.	53.168.800,00
86	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	RP.	5.000.000,00
87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	3.527.828.451,00

88	Program Pengelolaan Arsip	RP.	34.860.100,00
89	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	RP.	2.050.000,00
90	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	RP.	369.620.000,00
91	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	RP.	120.685.000,00
92	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	RP.	141.112.000,00
93	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		131.104.800,00
94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	4.210.039.671,00
95	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RP.	137.566.140,00
96	Program Penyuluhan Pertanian	RP.	221.533.610,00
97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	6.965.417.723,00
98	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RP.	387.391.343,00
99	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RP.	740.007.200,00
100	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RP.	80.778.237,00
101	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RP.	85.554.750,00
102	Program Perizinan Usaha Pertanian	RP.	128.660.000,00
103	Program Penyuluhan Pertanian	RP.	102.797.000,00
104	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	6.668.908.351,00
105	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	RP.	3.339.126.800,00
106	Program Perekonomian Dan Pembangunan	RP.	5.370.279.000,00
107	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	34.971.197.961,00
108	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	RP.	10.289.242.000,00
109	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	29.144.861.966,00
110	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RP.	296.630.400,00
111	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	6.284.193.923,00
112	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	RP.	23.634.000,00
113	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	RP.	165.559.813.210,00
114	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	RP.	448.145.484,00
115	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	8.247.925.639,00
116	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RP.	665.570.000,00
117	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	10.191.268.695,00
118	Program Kepegawaian Daerah	RP.	547.319.600,00
119	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	5.871.674.730,00
120	Program Penyelenggaraan Pengawasan	RP.	1.102.835.000,00
121	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	RP.	251.950.000,00
122	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	8.445.850.874,00
123	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	9.500.000,00
124	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	5.396.912.900,00
125	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	7.325.000,00
126	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	9.504.015.097,00
127	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	12.430.000,00
128	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	1.127.790.000,00
129	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertarikan Umum	RP.	2.250.000,00
130	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	5.250.000,00
131	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	2.455.502.319,00
132	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	9.312.000,00
133	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	1.531.1967.000,00
134	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertarikan Umum	RP.	1.496.000,00
135	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	5.056.000,00
136	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	2.575.204.232,00
137	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	2.201.612.504,00
138	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	860.000,00
139	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertarikan Umum	RP.	245.000,00
140	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	2.644.497.664,00
141	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	6.920.000,00
142	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	1.458.900,00
143	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	2.922.484.126,00
144	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	14.860.000,00
145	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	1.696.108.000,00
146	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	800.000,00
147	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertarikan Umum	RP.	6.200.000,00
148	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	2.441.735.983,00
149	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	1.183.974.052,00
150	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	2.700.000,00
151	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertarikan Umum	RP.	17.115.000,00
152	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	2.876.319.973,00
153	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	6.965.417.723,00

154	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	13.575.000,00
155	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	1.254.790.024,00
156	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	2.250.000,00
157	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	2.356.354.355,00
158	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	14.105.000,00
159	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	2.777.252.000,00
160	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	2.480.989.804,00
161	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	17.500.000,00
162	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	1.112.245.000,00
163	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	RP.	900.000,00
164	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	3.000.000,00
165	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	2.151.204.278,00
166	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	8.650.000,00
167	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	1.135.397.000,00
168	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	RP.	5.400.000,00
169	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	6.525.000,00
170	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	1.992.741.683,00
171	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	2.000.404.052,00
172	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	16.100.000,00
173	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	1.967.095.889,00
174	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	15.590.000,00
175	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	1.912.956.000,00
176	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	RP.	4.000.000,00
177	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	24.560.000,00
178	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	2.057.827.215,00
179	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	RP.	1.259.287.000,00
180	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RP.	1.206.571.220,00
182	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RP.	525.000,00
183	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	RP.	33.300.000,00
184	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	RP.	111.525.000,00
185	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP.	3.650.725.473,00

Kuala Tungkal, 2 Januari 2026
BURATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag